

**TINGKAT KEPUASAN WEWENANG SYAHBANDAR
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) LABUHAN HAJI
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

**MARNIZA
NIM.1705904010021**



**JURUSAN PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
MEULABOH
2022**

**TINGKAT KEPUASAN WEWENANG SYAHBANDAR
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) LABUHAN HAJI
KABUPATEN ACEH SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan
Universitas Teuku Umar

**MARNIZA
NIM. 1705904010021**



**JURUSAN PERIKANAN
FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
UNIVERSITAS TEUKUUMAR
MEULABOH
2022**

LEMBARAN PENGESAHAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa kami telah mengesahkan skripsi saudara:

NAMA : **MARNIZA**

NIM : 1705904010021

JUDUL : **TINGKAT KEPUASAN WEWENANG SYAHBANDAR DI
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) LABUHAN HAJI
ACEH SELATAN**

Yang diajukan memenuhi sebagai dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Perikanan pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar

Mengesahkan

Komisi Pembimbing

(Dr. Muhammad Rizal, S.Pi., M.Si)

NIP. 198301112021211004

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan**



(Prof. Dr. M. Ali S., M.Si)

NIP. 195903251986031003

Ketua Jurusan Perikanan

(Muhammad Agam Thahir, S.Pi., M.Si)

NIP. 19891024 2019031020

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

TINGKAT KEPUASAN WEWENANG SYAHBANDAR DI PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) LABUHAN HAJI ACEH SELATAN

Disusun oleh:

Nama : Marniza
Nim : 1705904010021
Program Studi : Perikanan
Fakultas : Perikanan dan Ilmu Kelautan

Telah ditetapkan di depan dewan penguji pada tanggal 27 Desember 2021 dan dinyatakan lulus dan memenuhi syarat untuk diterima.

SUSUNAN DOSEN PENGUJI

Tanda Tangan

1. **Dr. Muhammad Rizal, S.Pi., M.Si**
(Dosen Penguji I)



2. **Ir. T. Amarullah, M.Pi**
(Dosen Penguji II)

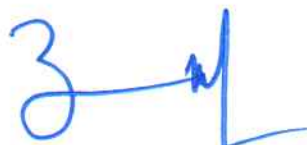


3. **Hafinuddin, S.Pi., M.Sc**
(Dosen Penguji III)



Mengetahui,

Ketua Jurusan Perikanan



(Muhammad Agam Thahr, S.Pi., M.Si)

NIP.198910242019031020

PERNYATAAN

Saya yang beranda tangan dibawah ini :

Nama : **Marniza**

NIM : 1705904010021

Jurusan : Perikanan

Fakultas : Perikanan dan Ilmu Kelautan

Judul Skripsi : TINGKAT KEPUASAN WEWENANG SYAHBANDAR DI
PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) LABUHAN HAJI
ACEH SELATAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa di dalam skripsi adalah hasil karya saya sendiri dan tidak terdapat bagian atau satu kesatuan yang utuh dari skripsi, buku atau bentuk lain yang saya kutip dari orang lain tanpa saya sebutkan sumbernya yang dapat dipandang sebagai tindakan penjiplakan. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat reproduksi karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain yang dijadikan seolah-olah karya asli saya sendiri. Apabila ternyata dalam skripsi saya terdapat bagian bagian yang memenuhi unsur penjiplakan, maka saya menyatakan kesediaan untuk dibatalkan sebahagian atau seluruh hak gelar kesarjanaan saya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Meulaboh, 27 Desember 2021



Marniza

RIWAYAT HIDUP



Marniza, lahir di Desa Ujung Padang, Kecamatan Manggeng, Kabupaten Aceh Barat Daya, Provinsi Aceh pada tanggal 28 April 2000 Penulis adalah anak pertama dari 2 orang bersaudara pasangan Abdul Rauf dan Juriah. Sekolah dasar lulus pada tahun 2011 di MIN 8 Aceh Barat Daya, SMP lulus pada tahun 2014 di SMP Negeri 1 manggeng kabupaten aceh barat daya, pendidikan SMA lulus pada tahun 2017 di SMA Negeri 2 Aceh Barat Daya dan pada tahun 2017 penuli terdaftar sebagai Mahasiswa pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar.

Selama menjadi mahasiswa penulis tergabung dalam tim paduan suara mahasiswa FPIK UTU, dan panitia REKERWIL Himpunan Mahaiswa Perikanan se-Sumatera tahun 2019. Sebagai penambahan wawasan Pendidikan Perikanan penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan pada tahun 2020 Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus, Padang dengan judul **“Tata Kelola Fasilitas Fungsional Di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Bungus Sumatera Barat”**. Untuk memperoleh gelar sarjana Perikanan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Universita Teuku Umar penulis melanjutkan penelitian dengan judul **“Tingkat Kepuasan Wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji”** Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Sarjana pada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar.

TINGKAT KEPUASAN WEWENANG SYAHBANDAR PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) LABUHAN HAJI KABUPATEN ACEH SELATAN

Marniza¹ Muhammad Rizal²

¹Mahasiswa Program Studi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Universitas Teuku Umar

²Dosen Program Studi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan,
Universitas Teuku Umar

ABSTRAK

Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk mengurus administrasi dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan *surve*. Analisis yang digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan adalah *Customer Satisfaction Index* (CSI). Hasil penelitian ini menunjukkan nilai CSI pada wewenang syahbandar di Pelabuhan Perikanan Labuhan Haji yang diperoleh adalah 83,1% (sangat puas).

Kata kunci: Syahbandar, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji, *Customer Satisfaction Index*.

**LEVEL OF SATISFACTION WITH THE AUTHORITY OF THE
AUTHORITY OF THE COASTAL FISHING PORT (PPP) LABUHAN
HAJI REGENCY OF ACEH SELATAN**

Marniza¹ Muhammad Rizal²

*¹Student at Department of Fisheries, Faculty of Fisheries and Marine Sciences,
Teuku Umar University*

*²Lecturer at Department of the Fisheries, Faculty of Fisheries and Marine
Sciences, Teuku Umar University*

ABSTRACT

Harbormaster at fishing ports is the implementation of government duties and functions at fishing ports to ensure the security and operational safety of fishing vessels. The harbormaster at the fishing port is the portmaster who is specially placed at the fishing port for administrative management and carrying out the function of maintaining shipping safety. The method used in this study is a descriptive method with a survey approach. The analysis used to analyze the level of satisfaction is the Customer Satisfaction Index (CSI). The results of this study indicate that the CSI value on the authority of the harbormaster at the Labuhan Haji Fishing Port obtained is 83.1% (very satisfied).

Keywords: Harbormaster, Coastal Fishing Port (PPP) Labuhan Haj, Customer Satisfaction Index.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rasa syukur yang dalam hanya milik-nya, berkat rahmat dan hidaya ALLAH SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul **“Tingkat Kepuasan Syahbandr Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan”**

Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi cahaya dalam dunia pengetahuan. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat memenuhi beban studi yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana (SI) di Program Studi Perikanan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar Meulaboh Aceh Barat.

Dalam menyelesaikan penulis skripsi ini penulis mendapat arahan dan bimbingan dari banyak pihak. Oleh karena itu melalui kata pengantar ini ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Abdul Rauf dan ibunda tercinta Juriah, adik tercinta Sariana, dan kepada seluruh keluarga besar telah memberikan motivasi baik materi maupun spritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Muhammad Rizal, S.Pi,M.Si selaku pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu, memberi banyak motivasi dan semangat serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Ir. T. Amarullah, M.Pi selaku penguji pertama dan Bapak Hafinuddin, S.Pi, M.Sc selaku penguji kedua selaku penguji yang telah banyak memberi saran dan arahan kepada penulis.
4. Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, bapak dan ibu dosen yang telah membantu penulis untuk mengadakan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Agam Thahir, S.Pi, M.Si selaku Ketua Program Studi Perikanan, Bapak Anhar Rozi, S.Pi., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Teuku Umar.

6. Staf jurusan Perikanan serta seluruh Dosen yang telah memberikan ilmu serta bimbingan kepada penulis selama menjalani pendidikan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan di Universitas Teuku Umar.
7. Bapak Renaldi, S.St,Pi selaku kepala pelabuhan perikanan,serta pihak DKP Aceh Selatan yang banyak membantu penulis dalam mendapatkan data dalam penelitian ini.
8. Terimakasih kepada sahabat terdekat Afifah Febrian Tari, S.Pi, Ika Sri Yulianti, S.Pi, Cut Finah, S.Pi, Deski Alfayed P, S.Pi, Zulfikar, S.Pi, Emil Kostadino, S.Pi, Setiadi M Noor, S.Pi, dan Harzawi Abha, S.Pi,yang selalu setia membantu dan memberi motivasi dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih Teman-teman seperjuangan telah memberi dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga segala bantuan dan jasa yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari ALLAH SWT dan semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Meulaboh 27 Desember 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Manfaat Penelitian	3
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Pelabuhan Perikanan.....	5
2.2 Tipe Pelabuhan Perikanan.....	5
2.2.1 Pengertian Pelabuhan Perikanan	6
2.2.1 Fungsi Pelabuhan Perikanan.....	6
2.3 Dasar Hukum Pelabuhan Perikanan.....	8
2.4 Kesyahbandaran Pelabuhan	8
2.4.1 Tugas Kesyahbandaran.....	9
2.4.2 kewewengan Syahbandar	10
2.5 Penelitian Terdahulu	10
2.6 Pengertian <i>Customer Satisfaction Index (CSI)</i>	11
BAB III. METODE PENELITIAN	13
3.1 Waktu dan Tempat.....	13
3.2 Alat Penelitian.....	13
3.3 Metode Pengumpul Data.....	14
3.5 Teknik Pengumpul Data.....	14
3.5.1 Data Primer.....	15
3.5.2 Data Sekunder.....	16
3.6 Analisis Data.....	16
BAB IV. KEADAAN UMUM LOKASI.....	17
4.1 Deskripsi profil pelabuhan perikanan labuhan haji.....	17
4.2 Deskripsi keadaan perikanan tangkap.....	21
4.3 Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai labuhan haji	28

BAB V. HASIL DAN PEMBAHASAN	33
5.1 Tugas dan wewenang syahbandar	33
5.1.1 Customer Satisfaction Indeks (CSI)	38
5.2 Pembahasan	40
BAB VI. Kesimpulan dan Saran.....	43
6.1 Kesimpulan	43
6.2 Saran.....	43
Daftar Pustaka.....	44
Lampiran	47

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Peralatan Penelitian.....	13
2. Data sekunder.....	16
3. Jumlah armada penangkapan	22
4. Jumlah alat tangkap.....	23
5. Jumlah nelayan.....	26
6. Jumlah volume produksi	27
7. Standar indikator pelabuhan perikanan pantai labuhan haji	28
8. Fasilitas pokok pelabuhan perikanan pantai labuhan haji.....	29
9. Fasilitas fungsional pelabuhan perikanan pantai labuhan haji.....	31
10. Fasilitas penunjang pelabuhan perikanan pantai labuhan haji	32
11. Hasil perhitungan CSI.....	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Peta lokasi penelitian.....	13
2. Struktur organisasi	21
3. Armada penangkapan.....	22
4. Jumlah alat tangkap.....	24
5. Jumlah nelayan.....	26
6. Volume produksi.....	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. Dan kepelabuhanan perikanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan perikanan dalam menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal perikanan dan merupakan salah satu pusat pertumbuhan perekonomian nasional di daerah yang terkait dengan kegiatan perikanan, namun tetap mempertimbangkan tata ruang wilayah (PERMEN KP No per.08/Men/2012).

Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan yaitu pelayanan pembinaan mutu dan pengelolaan hasil perikanan, pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan sebagai tempat pelaksanaan penyuluhan dan perkembangan masyarakat nelayan, pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan yang digunakan sebagai tempat kegiatan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, pelaksanaan kesyahbandaran, tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan, publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan serta sebagai tempat pengawas kapal perikanan (No 08/PERMEN-KP/2012).

Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di pelabuhan perikanan untuk menjamin keamanan serta keselamatan operasional kapal perikanan. Syahbandar di pelabuhan perikanan adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk mengurus administrasi dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran (PERMEN KP No 08/Men/2012).

Syahbandaran di pelabuhan perikanan memiliki tugas utama untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi sebagai pengawasan keselamatan pelayaran. Keselamatan pelayaran adalah rangkaian tindakan pemeriksaan terhadap kelaikan kapal yang berada di seluruh Pelabuhan Perikanan (PP) termasuk Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji. Syahbandar berkewenangan untuk mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sesuai dengan aturan hukum masing-masing untuk setiap Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang merupakan personil Pelabuhan Perikanan (PERMEN KP No 03/Men/2013).

Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan aktivitas kapal perikanan dan infrastruktur perikanan dalam mendukung pengembangan sistem perikanan tangkap. Maka dengan adanya Pelabuhan perikanan pantai aktivitas-aktivitas perikanan tangkap menjadi lebih mudah dan teratur. Pelabuhan perikanan pantai bukan hanya saja menyediakan fasilitas untuk aktivitas pendaratan ikan, pengolahan dan pendistribusian hasil tangkapan tetapi juga memberikan pelayanan yang optimal terhadap nelayan sebagai pengguna fasilitas yang tersedia di PPP Labuhan Haji. Seperti mengatur kedatangan kapal perikanan, menerbitkan surat tanda bukti lapor

kedatangan kapal perikanan, Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI) dan pembuatan surat izin berlayar.

Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi terhadap tugas Syahbandar dalam membantu dan memberikan pelayanan terhadap nelayan. Oleh karena itu penelitian ini sangat penting untuk melakukan penelitian dengan judul “Tingkat Kepuasan Wewenang Syahbandaran Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di jelaskan diatas maka permasalahan yang ingin dilihat adalah Bagaimana tingkat kepuasan nelayan terhadap peran wewenang Syahbandar dalam menerapkan standar keamanan dan keselamatan pelayaran di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji Kecamatan Aceh Selatan?

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan wewenangan syahbandar dan melayani para nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan.

1.4 Manfaat

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

- 1) Bagi penulis, hasil penelitian ini digunakan untuk menulis skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas teuku Umar.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumber informasi kepada peneliti, nelayan dan dinas terkait, serta dapat

memberikan manfaat sebagai sumber pengetahuan tentang bagaimana seharusnya Wewenang Syahbandar Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan juga termasuk dalam pelabuhan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan proses penangkapan ikan. Pelabuhan Perikanan (PP) merupakan titik temu antara atau titik penyambung anatara wilayah perairan biasanya juga disebut daerah penangkapan ikan atau daerah produksi hasil tangkapan dan wilayah daratan atau *arriere pays continental* (yaitu daerah distribusi dan konsumsi produk perikanan laut) (Lubis 2012).

Pelabuhan perikanan termasuk dalam pelabuhan khusus yang diperuntukkan bagi kegiatan penangkapan ikan. Pelabuhan Perikanan (PP) merupakan titik temu atau titik penyambung antara wilayah perairan atau *avant pays* maritim (dapat juga daerah penangkapan ikan atau daerah produksi penangkapan ikan) dan wilayah daratan atau *arriere pays continental* (disebut juga daerah distribusi dan komsumsi produk perikanan laut) (Lubis 2012).

2.2 Tipe Pelabuhan Perikanan

Menurut PER.08/MEN/2012 Pelabuhan perikanan diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelas, yaitu:

- a) Pelabuhan Perikanan kelas A, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS);
- b) Pelabuhan Perikanan kelas B, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN);

- c) Pelabuhan Perikanan kelas C, yang selanjutnya disebut Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP); dan
- d) Pelabuhan Perikanan kelas D, yang selanjutnya disebut Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).

2.2.1 Pengetian Pelabuhan Perikanan

Pelabuhan perikanan merupakan salah satu pusat pemasaran hasil tangkapan, dimanan peran dan sarannya sangat penting dalam perekonomian suatu pelabuhan yaitu mulai dari pendaratan ikan sampai dengan pemasaran hasil tangkapan (Lubis 2011).

Pembangunan pelabuhan Perikanan ditinjau oleh pembangunan sarana pokok dalam bentuk pusat pendaratan ikan atau tempat pelelangan ikan yang mampu memberikan pelayanan serta kemudahan bagi proses produksi, pengolahan serta sosial ekonomi dengan segenap aspeknya (Martinus 2006).

2.2.3 Fungsi Pelabuhan Perikanan

Menurut Peraturan Menteri No.08/PERMEN-KP/2012, fungsi pelabuhan perikanan merupakan pendukung segala kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Pelabuhan mempunyai fungsi sebagai berikut.

1. Fungsi pemerintahan

Fungsi Pemerintahan Menurut Peraturan Menteri No.08/PERMEN-KP/2012, adalah fungsi untuk melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengendalian, pengawasan serta keamanan dan keselamatan operasional kapal perikanan dipelabuhan. Adapun fungsi pemerintahan pada Pelabuhan Perikanan meliputi:

- a).Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan
- b).Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan
- c).Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan
- d). Pelaksanaan kegiatan operasional perikanan
- e). Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan
- f). Pelaksanaan kesyahbandaran
- g). Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan
- h). Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawasan kapal perikanan
- i). Tempat publikasi hasil penelitian kelautan dan perikanan
- j). Pemantauan wilayah pesisir
- k). Pengendalian lingkungan
- l). Kepabeanan dan
- m).Keimigrasian.

Selain memiliki fungsi pemerintahan yang telah disebutkan diatas pelabuhan perikanan juga dapat melaksanakan fungsi pemerintahan lainnya terkait dengan pengelolaan perikanan sesuai dengan peraturan yang ada.

2. Fungsi Pengusahaan

Fungsi pengusahaan pada Pelabuhan Perikanan (PP) Menurut Peraturan Menteri No.08/PERMEN-KP/2012, merupakan fungsi untuk melaksanakan pengusaha berupa penyediaan dan pelayaran jasa kapal perikanan dan terkait di Pelabuhan Perikanan. Adapun fungsi pengusaha pada Pelabuhan Perikanan meliputi:

- a). Pelayanan tambat labuh kapal
- b). Pelayanan bongkar muat ikan
- c). Pelayanan pengolahan hasil perikanan
- d). Pemasaran dan distribusi ikan
- e). Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan
- f). Pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan
- h). Wisata bahari dan
- i). Penyediaan dan pelayanan jasa lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3 Dasar Hukum Pelabuhan Perikanan

Menurut Keputusan Menteri No. 6/KEPMEN-KP/2018, Pelabuhan Perikanan pada awalnya berfungsi sebagai tempat beraktivitas yang aman bagi nelayan dan kapal perikanan. Fungsi awal tersebut selanjutnya menyebabkan pertumbuhan konsentrasi nelayan dan kapal perikanan. Kemudian diikuti dengan aktivitas terkait lainnya seperti pembangunan dan perbaikan.

Pembangunan dan perbaikan kapal, serta pemasaran produk Perikanan. Beranjak dari aktivitas dasar tersebut, keberadaan Pelabuhan Perikanan mulai tumbuh berkembang menjadi suatu prasarana yang berfungsi untuk menunjang aktivitas kelautan dan perikanan dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya ikan mulai dari kegiatan praproduksi, produksi, pasca produksi, pengolahan, pemasaran ikan, dan pengawasan sumber daya ikan.

2.4 Kesyahbandaran Pelabuhan

Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan di Pelabuhan Perikanan untuk menjamin keamanan dan

keselamatan operasional kapal perikanan. Syahbandar di Pelabuhan Perikanan adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di Pelabuhan Perikanan untuk mengurus administrasi dan menjalankan fungsi serta menjaga keselamatan pelayaran (PERMEN KP No 08/Men/2012).

Syahbandar adalah pejabat pemerintah di Pelabuhan Perikanan yang diangkat langsung oleh menteri perikanan dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menentukan menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan Perundang-Undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran (Arthur 2019).

Syahbandar adalah pejabat pemerintahan di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran serta koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan (Setiawan 2016)

2.4.1 Tugas Kesyahbandaran

Syahbandar memiliki tugas mengawasi kelayakan lautan kapal yang meliputi keselamatan, keamanan dan ketertiban di pelabuhan seorang syahbandar akan diminta pertanggung jawaban atas terjadinya kecelakaan kapal dilaut (Setiawan 2016).

Syahbandar Pelabuhan Perikanan mempunyai tugas yaitu, mengatur kedatangan kapal perikanan, memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan, menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan kapal perikanan, mengatur keberangkatan kapal perikanan, menerbitkan surat tanda bukti keberangkatan kapal perikanan, menerbitkan surat persetujuan berlayar,

memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan, memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut, memeriksa logbook penangkapan ikan mengatur olah gerak dan lalu lintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan, mengawasi pemanduan, mengawasi pengisian bahan bakar, mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan, melaksanakan bantuan dan penyelamatan, memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadam kebakaran di pelabuhan perikanan, mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim, memeriksa pemenuhan persyaratan pengawasan kapal perikanan dan memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan (PERMEN KP No 3/Men/2013).

2.4.2 Kewewenangan Syahbandar

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan mempunyai kewewenangan untuk mengatur kedatangan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan rencana kedatangan dari nahkoda atau pemilik kapal/ penanggung jawab perusahaan (PERMEN KP No 3/Men/2013).

Merujuk pada Undang-Undang No 17 tahun 2008 tentang kewewenangan syahbandarpasal 211 menjelaskan bahwa kewewenangan Syahbandar memiliki kewenangan tertinggi melaksanakan koordinasi kegiatan, keimigrasian, kekarantinaan, dan kegiatan institusi pemerintahan lainnya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Kantor syahbandar utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melakukan pemeriksaan surat-surat kapal sebelum berlayar. Penelitian dilakukan untuk meneliti tingkat kepuasan

stakeholder terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang syahbandar di PPP Tumumpa dan mengkaji kendala-kendala yang dihadapi syahbandar dalam pelaksanaan tugas dan wewenang syahbandar. Pengumpulan data dilakukan berdasarkan tanggapan atas pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Metode analisis data, menggunakan analisis statistik sederhana dalam bentuk tabulasi silang serta Tugas dan wewenang sudah dilaksanakan dengan sangat baik yang ditunjukkan oleh tingkat kepuasan *stakeholder* dengan nilai masing-masing 4,74 , 4,02 dari nilai maksimum 5.00. Beberapa masalah yang teridentifikasi kesyahbandaran di PPP Tumumpa belum mempunyai gedung perkantoran yang memadai, radio komunikasi belum tersedia dan kantor kesyahbandaran tidak memiliki kapal patroli (Turang *et al.* 2019).

2.6 Pengertian *Customer Satisfaction Index* (CSI)

Customer Satisfaction Index (CSI) merupakan metode pengukuran untuk menentukan tingkat kepuasan konsumen secara menyeluruh dengan mempertimbangkan dari atribut-atribut kualitas pelayanan jasa yang diukur (Patimah 2016).

Pengukuran terhadap indeks kepuasan konsumen atau *Customer Satisfaction Index* (CSI) diperlukan karena hasil dari pengukuran dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan sasaran ditahun-tahun mendatang karena indeks ini berbanding lurus dengan kualitas pelayanan (Irawan 2006).

Menurut Irawan dalam Kurnia (2019), pengukuran terhadap CSI diperlukan karena hasil dari pengukuran dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan saran-saran ditahun mendatang. *Customer Satisfaction Indeks* (CSI) digunakan untuk menentukan tingkat atribut dan pelayanan jasa tambat labuh dengan

pendekatan tingkat kepentingan atribut yang diukur dengan metode pengukuran CSI.

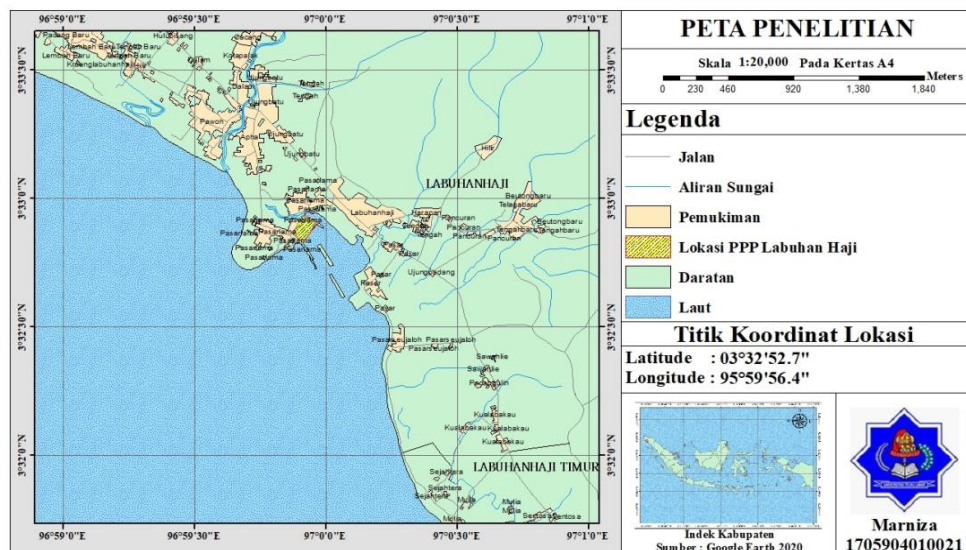
Berdasarkan penelitian Kurnia (2019), dengan judul penelitian “Tingkat Kepuasan Nelayan Terhadap Pelayanan Jasa Tambat Labuh Di Pelabuhan Perikanan Samudera Bungus” dengan menggunakan analisis *Customer Satisfaction Indeks* (CSI) dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa nelayan di PPS Bungus merasa sangat puas dengan kinerja pelayanan jasa tambat labuh yang diberikan oleh pihak pelabuhan. Hal itu dapat diketahui dari hasil Customer Satisfaction Indeks (CSI) yang sangat tinggi dengan nilai 0,86 atau 86,44%. Sedangkan atribut yang dianggap kurang penting oleh nelayan dan pihak pelabuhan memiliki kinerja yang biasa-biasa saja yaitu kegiatan promosi pelayanan.

BAB III

METEDEOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu Dan Tempat

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 19 Mei 2021 - 12 Juni 2021 di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan.



(Sumber : Google Earth, 2020)

Gambar 1. Peta lokasi penelitian

3.2 Peralatan Penelitian

Peralatan yang dilakukan dalam penelitian adalah dapat dilihat pada tabel 1

No	Alat	Kegunaan
1	Questioner	Pendataan tentang nelayan
2	Kamera (<i>hand phone</i>)	Dokumentasi kegiatan
3	Alat tulis	Mencatat data

3.3 Metode Pengambilan Data

Metode pengambilan data dengan menggunakan deskriptif dengan pendekatan survei. Metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap

variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menggabungkan dengan variabel lain (Sugiyono 2013 dalam Setiawan 2018).

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir

Penelitian ini menggunakan tingkat keandalan 90% karena menggunakan tingkat kelonggaran ketidaktelitian sebesar 10%. Menurut Sugiyono (2008) pembulatan ke atas dilakukan karena berdasarkan tabel ukuran sampel dan batas kesalahan untuk tingkat kelonggaran penelitian 10%. Apabila dilakukan perhitungan menggunakan rumus, maka jumlah minimum yang di peroleh adalah:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2} = \frac{741}{1 + 741(0.1)^2} = \frac{741}{8.41} = 88.10/88 \text{ Responden}$$

Kriteria responden yang dipilih selama penelitian adalah semua jenis nelayan yang mendaratkan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 88 responden yang terdiri dari semua jenis nelayan yang mendaratkan hasil tangkapan di labuhan haji.

3.3.1 Teknik Pengumpulan Data

Metode survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuisisioner sebagai instrumen utama untuk mengumpulkan data. Metode ini adalah yang paling sering dipakai di kalangan mahasiswa. Desainnya sederhana, prosesnya cepat. Tetapi bila dilakukan dengan sembarangan, temuan survei ini cenderung *superficial* (dangkal) meskipun dalam analisisnya peneliti menggunakan statistik yang rumit (Siyoto *et al.* 2015).

Data yang akan dikumpulkan pada penelitian ini yang berupa data primer dan data sekunder sebagai berikut:

3.5.1 Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan berupa wawancara dan keterangan informasi dari responden. Wawancara dilakukan berdasarkan suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan terlebih dahulu (Puspita 2016).

Data primer didapatkan dengan cara wawancara kepada nelayan yang terkait dengan kegiatan syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) labuhan haji atau *stakerholder*. Berdasarkan panduan quesioner untuk memperoleh data tentang kegiatan wewenang syahbandar, seperti mengatur kedatangan kapal perikanan, pengurus administrasi dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran. Pengambilan datanya melalui survei yaitu wawancara secara mendalam yang ditujukan untuk mengetahui pendapat mereka dan memperoleh gambaran terkait wewenang syahbandar.

3.5.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal dan lain-lain (Siyoto *et al.* 2015)

Data dibutuhkan dalam penelitian ini adalah:

Tabel 2. Data Sekunder

No	Data Yang Dikumpulkan	Sumber Informasi
1	Letak geografis lokasi penelitian	UPTD PPP Labuhan haji
2	Peta lokasi penelitian	UPTD PPP Labuhan haji
3	Struktur organisasi	UPTD PPP Labuhan haji
4	Jumlah alat tangkap	UPTD PPP Labuhan haji
5	Jumlah armada penangkapan	UPTD PPP Labuhan haji
6	Nilai dan volume produksi	UPTD PPP Labuhan haji

3.6 Analisis Data

Pengolahan data kajian wewenang syahbandar menggunakan metode *Customer Satisfaction Indek (CSI)*. Analisis *CSI* digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna jasa secara menyeluruh dengan melihat tingkat kinerja dan tingkat kepentingan atau harapan dari atribut-atributjasa pelayanan (Umam *et al.* 2018).

a. Analisis deskriptif kualitatif

Analisis data yang digunakana adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif adalah analisis yang diwujudkan dengan cara menggambarkan kenyataan atau keadaan-keadaan atau suatu objek dalam bentuk gambar, tabel, grafik, dll, dengan menggunakan *Microsoft Excel 2007*.

b. Customer satisfaction index (CSI)

Customer Satisfaction Index (CSI) digunakan untuk menghitung tingkat kepuasan nelayan *purse seine* secara menyeluruh dengan melihat tingkat kepentingan dari atribut-atribut produk/jasa.

Menurut Irwan (2006) dalam Razaq (2020), pengukuran terhadap *customer satisfaction indeks (CSI)* Diperlukan karena hasil dari pengukuran dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan sasaran-sasaran di tahun mendatang. *CSI* digunakan untuk menentukan tingkat atribut dan perangkat pelayanan penyediaan kebutuhan melaut secara menyeluruh dengan pendekatan skor kepentingan dan skor kepuasan dari atribut yang diukur.

Besarnya *CSI* dapat diketahui dengan langkah-langkah berikut:

1. Menentukan *mean importance score (MIS)* dan *mean satisfaction score (MSS)*

Nilai ini berasal dari rata-rata kepentingan/tingkat harapan tiap terhadap atribut pelayanan.

$$MIS = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}$$

Nilai ini berasal dari rata-rata tingkat kepuasan terhadap atribut pelayanan.

$$MSS = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

Dimana:

n = jumlah konsumen

Y_i = Nilai kepentingan/tingkat harapan tiap nelayan terhadap atribut -i

X_i = Nilai tingkat kepuasan tiap nelayan terhadap atribut ke-i

2. Membuat *weight factors* (WF)

Bobot ini merupakan persentase nilai MIS seluruh produk layanan.

$$WF = \frac{M}{\sum p M} \times 100\%$$

Dimana:

P = produk layanan kepentingan ke-p

3. Membuat *weight score* (WS)

Bobot ini merupakan perkalian antara WF dengan rata-rata tingkat kepuasan

X (*mean satisfaction score* = MSS)

$$WS_i = W_{fi} \times MS_s$$

4. Menentukan *customer satisfaction index* (CSI)

$$CSI = \frac{WT}{L} \times 100\%$$

Dimana :

L = Skala maksimal yang digunakan

Berdasarkan buku panduan survei kepuasan konsumen PT Sucofindo Fheruati (2004) tingkat kepuasan (Nelayan) secara keseluruhan dapat dilihat dari kriteria tingkat wewenang syahbandar, dengan kriteria sebagai berikut:

- 0,00 – 0,34 : Tidak puas (Pelayanan tidak memenuhi kebutuhan nelayan)
- 0,35 – 0,50 : Kurang puas (Pelayanan kurang memenuhi kebutuhan nelayan)
- 0,51 – 0,65 : Cukup puas (Pelayanan cukup memenuhi kebutuhan nelayan)
- 0,66 – 0,80 : Puas (Pelayanan sudah memenuhi kebutuhan nelayan)
- 0,81 – 1,00 : Sangat puas (Pelayanan sangat memenuhi kebutuhan nelayan)

BAB IV

KEADAAN UMUM LOKASI

4.1 Deskripsi Profil Pelabuhan Perikanan Labuhan Haji

Kabupaten Aceh Selatan merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, oleh karena itu, iklim di daerah Aceh Selatan relatif panas. Meskipun begitu, secara geografis Aceh Selatan berdekatan dengan Pegunungan Bukit Barisan. Aceh Selatan terletak pada 2° - 4° LU, 96° - 98° BT. Luas wilayah Aceh Selatan sekitar 7% dari luas Provinsi Aceh, dan memiliki kira-kira 250 desa. Suhu udara di Aceh Selatan berkisar antara 28° - 33°. Curah hujan Aceh Selatan berkisar antara 2000 sampai 3700 mm/tahun. Kecepatan angin di Aceh Selatan berkisar 9 - 14 knot.

Kabupaten Aceh Selatan adalah salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Aceh, Indonesia. Sebelum berdiri sendiri sebagai kabupaten otonom, calon wilayah Kabupaten Aceh Selatan adalah bagian dari Kabupaten Aceh Barat. Pembentukan Kabupaten Aceh Selatan ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 pada 4 November 1956. Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 10 April 2002 resmi dimekarkan sesuai dengan UU RI Nomor 4 tahun 2002 menjadi tiga Kabupaten, yaitu: Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Selatan.

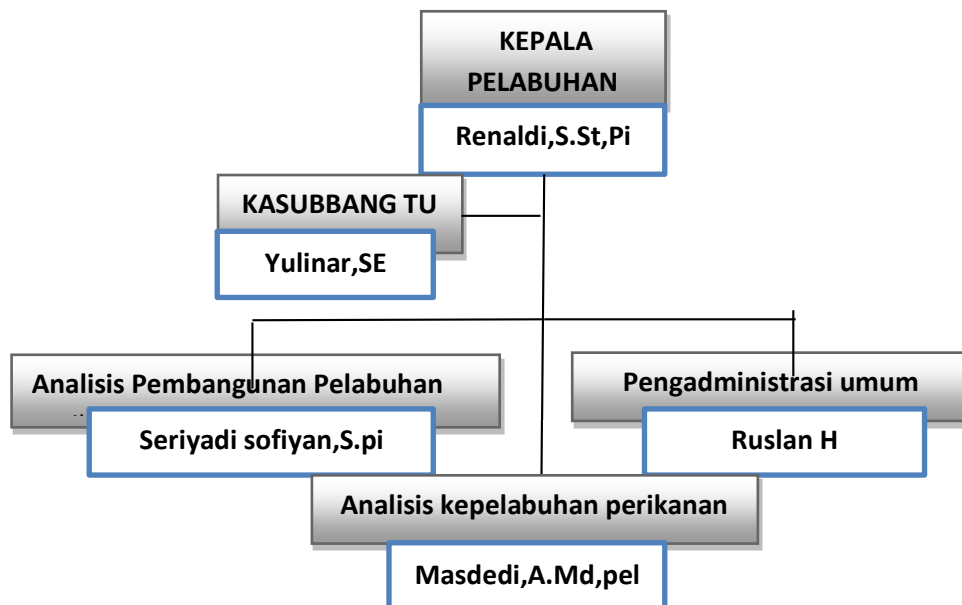
Kabupaten Aceh Selatan memiliki 8 kecamatan pesisir yang salah satunya adalah kecamatan Labuhan Haji. Labuhan Haji memiliki salah satu Pelabuhan Perikanan Pantai yang terbesar yang ada di daerah Aceh Selatan. Kecamatan Labuhan Haji termasuk salah satu kecamatan yang banyak penduduknya yang

berdominan bermata pencahariaannya sebagai nelayan dan para nelayan mendaratkan hasil tangkapan di pangkalan pendarat ikan yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji.

Adapun batas wilayah Kabupaten Aceh Selatan yaitu sebelah Utara berbatas dengan Kabupaten Aceh Barat Daya, Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Subulussalam Dan Kabupaten Aceh Singkil, Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara. Kemudian dominan mata Pencaharian Sebagai nelayan ini tersebar disepanjang pesisir Kabupaten Aceh Selatan mulai dari Labuhan Haji sampai Bakongan dan terbanyak yang berprofesi sebagai nelayan terdapat di Kecamatan Labuhan Haji, Sawang dan Kecamatan Bakongan.

Berdasarkan letak geografis, Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji terletak pada titik koordinat 03°32'53'' N dan 96°59'56''E, dan merupakan bagian dari Kecamatan Labuhan Haji di Aceh Selatan. Secara tata kelola operasional PPP Labuhan Haji berdasarkan KEPMEN-KP No. 27 tahun 2018 merupakan salah satu UPTD yang berada langsung dibawah pengawasan Provinsi Aceh dan wajib menyampaikan laporan kegiatan pelabuhan perikanan setiap bulannya kepada Gubernur Aceh.

Menurut peraturan gubenur Nanggroe Aceh Darussalam nomor 27 tahun 2018 tentang tata kerja unit pelaksanaan teknis dinas kelautan dan perikanan disebutkan bahwa susunan struktur organisasi yang ada di Pelabuhan perikanan Pantai (PPP) Labuhan haji untuk mengelola pelabuhan. Adapun susunan struktur organisasi yang ada di Pelabuhan perikanan pantai Labuhan haji dapat dilihat pada gambar 2 di bawah ini.



Sumber : UPTD PPP Labuhan Haji, 2021

Gambar 2. Struktur Organisasi PPP Labuhan Haji

4.2 Deskripsi Keadaan Perikanan Tangkap

A. Armada Penangkapan

Kapal merupakan salah satu sarana penunjang kegiatan produksi perikanan yang salah satunya harus ada dalam operasi penangkapan ikan. Menurut Undang-undang No.45 tahun 2009 tentang perikanan, kapal perikanan adalah kapal perahu ataupun yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan.

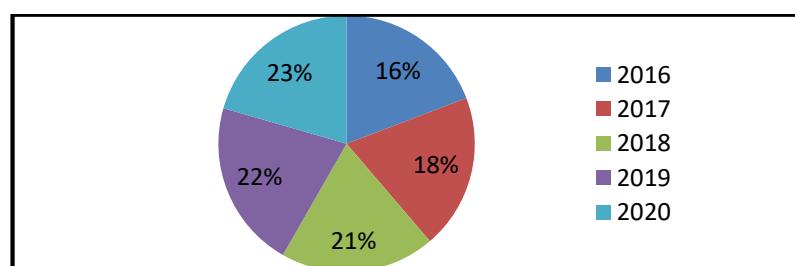
Berdasarkan data kapal yang ada di Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Aceh Selatan yang telah diterbitkan Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan Kapal Perikanan (STBLKK) selalu menunjukkan perubahan. Setiap tahunnya untuk jumlah kapal hanya mengalami perbedaan yang sangat sedikit dari kapal yang berukuran kecil maupun kapal berukuran besar. Jumlah kapal yang beroperasi selama lima tahun terakhir ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah armada kapal di Kecamatan Labuhan Haji periode 2016-2020

No	Tahun	Ukuran Kapal (GT)					Jumlah Unit
		0-10	10-20	20-30	30-50	50-70	
1	2016	58	10	5	4	0	77
2	2017	59	10	7	7	2	85
3	2018	59	13	8	11	6	97
4	2019	64	13	10	11	6	104
5	2020	62	14	12	12	7	107

(Sumber DKP Aceh Selatan 2020)

Maka Dari tabel 3 diatas dapat dilihat bahwa selama 5 tahun menunjukkan jumlah kapal yang ada dikecamatan Labuhan Haji mengalami kenaikan dari tahun ketahun, pada tahun 2016 jumlah armada penangkapan berjumlah 77 unit sedangkan pada tahun 2017 jumlah armada kapal menalami kenaikan yang berjumlah 85 unit, pada tahun 2018 jumlah armada penangkapan juga mengalami kenaikan yaitu menjadi 97 unit, pada tahun 2019 jumlah armada penangkapan mengalami kenaikan yang berjumlah 104 unit, dan pada tahun 2020 merupakan tahun yang memiliki armada penangkapan yang jumlahnya lebih meningkat dari tahun 2019 yaitu 107 unit kapal.



Gambar 3. Diagram jumlah armada penangkapan

Berdasarkan diagram pada gambar 5, menjelaskan bahwa *persentase* penambahan kapal setiap tahun yang dimulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 tidak sama. Tahun 2016 jumlah armada kapal 60 unit sekitar (19%), kemudian pada tahun 2017 jumlah armada kapal naik menjadi 61 unit atau menjadi (20%). Tahun 2018 *persentase* jumlah armada tidak mengalami

kenaikan dan tetap sekitar (20%) atau 61 unit, pada tahun 2019 jumlah armada kapal mengalami kenaikan menjadi 67 unit atau sekitar (21%). Tahun 2020 jumlah armada kapal perikanan yang ada di PPP Labuhan haji mengalami penurunan (20%) menjadi 62 unit.

B. Alat Tangkap

Alat tangkap ikan merupakan komponen terpenting bagi nelayan karena merupakan alat utama dari mata pencahariannya. Beragam jenis alat tangkap yang digunakan oleh nelayan sekarang untuk bisa memperoleh hasil tangkapan yang lebih meningkat. Modifikasi alat tangkap saat ini juga sudah beragam ini sangat berguna bagi nelayan untuk dapat menghasilkan hasil tangkapan (Nurmala 2020).

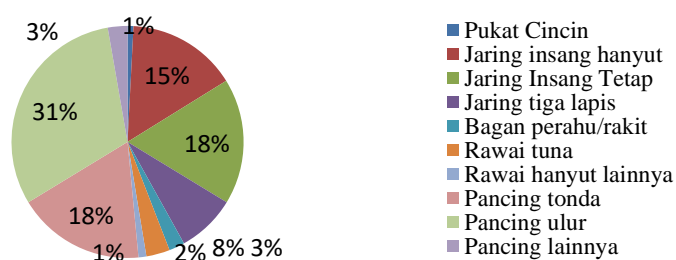
Berdasarkan data alat tangkap yang ada di Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Aceh Selatan selama 5 tahun yang mana setiap tahunnya selalu terjadi perubahan, berikut data alat tangkap di labuhan haji dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini.

Tabel 4: Jumlah alat tangkap di Kecamatan Labuhanhaji periode 2016-2020

No	Jenis Alat Tangkap	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pukat Cincin	3	3	3	2	2
2	Jaring insang hanyut	56	56	56	56	56
3	Jaring Insang Tetap	64	65	65	65	65
4	Jaring tiga lapis	30	30	30	30	30
5	Bagan perahu/rakit	8	8	9	9	9
6	Rawai tuna	12	12	12	12	12
7	Rawai hanyut lainnya	4	4	4	4	4
8	Pancing tonda	65	65	65	65	65
9	Pancing ulur	113	113	115	115	115
10	Pancing lainnya	10	11	11	11	11
	Jumlah	365	367	370	369	369

(Sumber : DKP Aceh Selatan 2020)

Berdasarkan Tabel 4 menjelaskan bahwa jenis alat tangkap dan usaha penangkapan yang banyak dilakukan oleh nelayan labuhan haji berupa alat tangkap Pukat Cincin (*Purse Saine*), jaring insang hanyut, jaring insang tetap, jaring tiga lapis, bagan perahu, rawai tuna, rawai hanyut lainnya, pancing tonda, pancing ulur, dan pancing lainnya. Pada tahun 2016 alat tangkap pancing ulur memiliki jumlah terbanyak dibandingkan alat tangkap lainnya yaitu 113 unit, selanjutnya pada tahun 2017 alat tangkap pancing insang tetap bertambah 1 unit. Pada tahun 2018-2019 alat tangkap pancing ulur bertambah 2 unit dan bagan perahu bertambah 1 unit. Pada tahun 2020 pukat cincin berkurang 1 unit.



Gambar 4. Diagram data jumlah alat tangkap

Berdasarkan gambar 5, menjelaskan bahwa alat tangkap pancing ulur lebih banyak didapatkan di PPP Labuhanhaji yaitu sebanyak 571 (31%) unit. Dan merupakan alat tangkap yang banyak digunakan di PPP Labuhan Haji. Perkembangan alat tangkap pancing tonda dan jaring insang tetap juga memiliki nilai yang hampir sama jumlahnya dengan pancing tonda sebanyak 325 unit (18%) dan jaring insang tetap sebanyak 324 unit (18%). Dan alat tangkap yang banyak digunakan ke 4 adalah jaring insang hanyut yaitu sebanyak 280 unit atau setara (15%) dan masih banyak yang mengoperasikan jaring tersebut sampai sekarang.

Pukat Cincin di PPP Labuhan Haji tidak ada mengalami peningkatan di tahun 2020 dan hanya mencapai 13 unit (1%). Namun walaupun alat tangkap pukat cincin lebih sedikit dibandingkan dengan pancing ulur tetapi hasil tangkapan pukat cincin (*Purse Seine*) jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan pancing ulur. Alat tangkap yang dominan digunakan oleh nelayan di PPP Labuhan Haji dilihat dari segi jumlahnya adalah pancing ulur, pancing tonda, jaring insang tetap dan jaring insang hanyut. Namun jika dilihat dari segi jumlah hasil tangkapannya pukat cincin merupakan alat tangkap yang lebih banyak menghasilkan hasil tangkapan.

C. Nelayan

Tenaga kerja manusia pada perikanan tangkap adalah suatu unsur yang paling menentukan karena setiap kegiatan operasi penangkapan tidak akan berjalan tanpa adanya tenaga kerja atau nelayan. Nelayan sangat membantu dari segi aktivitas yang ada diatas kapal begitu juga dengan nelayan perikanan tangkap yang ada di PPP Labuhanhaji walaupun kebanyakan nelayan di PPP Labuhan Haji memiliki tingkat pendidikan yang rendah namun tidak dengan pengetahuan mereka tentang cara yang baik dalam segi penangkapan, berdasarkan wawancara yang dilakukan di lapangan dengan nelayan, rata-rata tingkat pendidikan mereka hanya tingkat Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Tingkat Atas (SLTA).

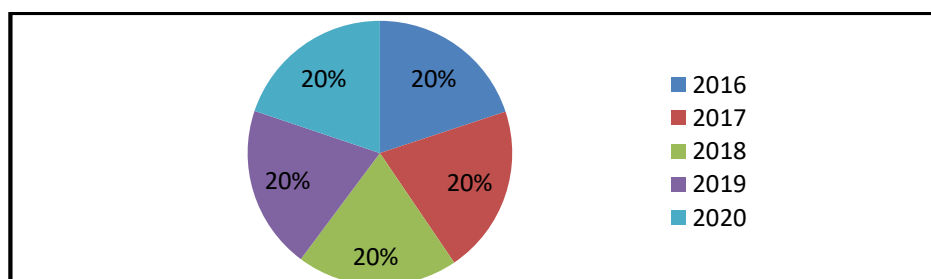
Berdasarkan data nelayan yang ada di Dinas Kelautan Perikanan (DKP) aceh selatan selama 5 (lima) tahun yang mana setiap tahunnya selalu menunjukkan perubahan, berikut data nelayan dilabuhan haji dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 5. Jumlah nelayan periode 2016 – 2020 di Kecamatan Labuhanhaji

No	Tahun	Nelayan Tetap	Nelayan Sambilan	Total
1	2016	418	20	438
2	2017	432	19	451
3	2018	413	19	432
4	2019	419	19	438
5	2020	416	19	435

(Sumber : DKP Aceh Selatan 2020)

Berdasarkan Tabel 5 dapat dijelaskan bahwa nelayan pada tahun 2016-2020 selalu mengalami perubahan jumlah nelayan, pada tahun 2016 jumlah nelayan mencapai 438 yang terdiri dari 428 nelayan tetap dan 20 nelayan sambilan, Pada tahun berikutnya yaitu 2017 jumlah nelayan mengalami peningkatan yaitu 451 orang yang terdiri dari 432 orang nelayan tetap dan 19 orang nelayan sambilan, selanjutnya pada tahun 2018 Jumlah nelayan mengalami penurunan, yaitu hanya sekitar 432 orang yang terdiri dari 413 nelayan tetap dan 19 orang nelayan sambilan, pada tahun 2019 jumlah nelayan mengalami peningkatan yaitu mencapai 438 orang nelayan yang terdiri dari 419 nelayan tetap dan 19 orang nelayan sambilan. Namun pada tahun 2020 nelayan kembali mengalami penurunan yaitu sekitar 435 orang nelayan yang terdiri dari 416 nelayan tetap dan 19 nelayan sambilan.



Gambar 5. Data nelayan di Kecamatan Labuhan Haji

Berdasarkan gambar diagram diatas dapat dijelaskan bahwa jumlah nelayan di PPP Labuhan Haji tidak ada mengalami peningkatan yang banyak dari tahun ke

tahun. Sehingga dari tahun 2016-2020 nelayan tidak bertambah dan tidak juga terlalu banyak yang berkurang yaitu pada tahun 2016 total nelayan sebanyak 438 sekitar (20%), tahun 2017 sebanyak 451 sekitar (20%), tahun 2018 sebanyak 432 orang (20%), tahun 2019 sebanyak 438 orang (20%) dan pada tahun sebanyak 435 orang (20%).

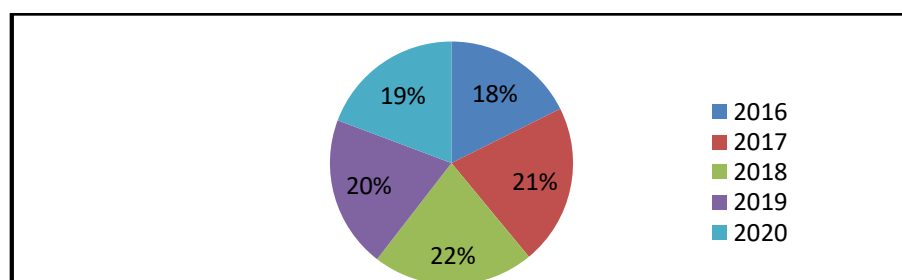
D. Jumlah Produksi Hasil Tangkapan

Jumlah hasil tangkapan merupakan jumlah yang didapatkan selama proses melakukan penangkapan Berdasarkan data Jumlah produksi hasil tangkapan merupakan jumlah yang didapatkan selama melakukan kegiatan penangkapan, yang mana setiap hasil tangkapan yang didapatkan selalu mengalami penurunan maupun kenaikan dan tentu saja mempengaruhi jumlah produksi hasil tangkapan. Berikut tabel data total produksi hasil perikanan di PPP Labuhan Haji pada 5 (lima) tahun terakhir.

Tabel 6. Jumlah volume Produksi di kecamatan Labuhan Haji 2016-2020

No	Tahun	Produksi (Ton)	Nilai (Rp. 1.000)
1	2016	3.462,00	86.550.000,00
2	2017	4.198,08	104.952.000,00
3	2018	4.217,76	105.444.000,00
4	2019	3.974,11	99.352.750,00
5	2020	3.785,76	94.664.000,00
Jumlah		25.790.970	1.044.023.400.00

(Sumber : DKP Aceh Selatan, 2020)



Gambar 6. Data jumlah volume produksi di kecamatan Labuhanhaji

Berdasarkan Gambar 6 Diagram diatas dapat dilihat bahwa tahun 2016 merupakan tahun yang paling sedikit produksi hasil tangkapan di PPP Labuhanhaji yang hanya 3.462,00 ton atau sekitar (18%). Namun pada tahun 2017-2018 jumlah produksi meningkat setiap tahunnya hingga mencapai 4.217,76 ton atau setara dengan (22%) , ini merupakan produksi tertinggi selama 3 tahun terakhir ini Pada tahun 2020 produksi mengalami penurunan dari tahun 2019 yang hanya mencapai 4.217,76 ton atau sekitar (19%). Adanya penurunan dan kenaikan ini disebabkan juga dengan jumlah alat tangkap dan armada penangkapan, namun yang terjadi di PPP Labuhan Haji adalah setiap tahunnya mengalami kenaikan yang tidak drastis ini disebabkan karna PPP Labuhan Haji masih kekurangan fasilitas untuk tambat labuh.

4.3 Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji

Pelabuhan perikanan Pantai Labuhan Haji merupakan salah satu jenis pelabuhan perikanan yang sudah bertipe C berdasarkan PERMEN-KP No 8 tahun 2012 untuk pelabuhan perikanan yang bertipe C itu memiliki klasifikasi khusus, berikut ini adalah tabel perbandingan antara PPP Labuhan Haji dengan Klasifikasi yang telah di tetapkan pada PERMEN-KP No 8 tahun 2012.

Tabel 7. satandar indikator PPP pada PERMEN-KP no 8 tahun 2012 dan PPP Labuhan Haji.

Kriteria Teknis ppp Pada PERMEN-KP	Kriteria Teknis PPP Labuhan Haji	Standar Indikator PERMEN-KP No
Dermaga	10x100 meter	100 meter
Kedalaman kolam	3,5 meter	< 2 meter
Kapasitas tampung	100 unit	30 unit atau 300 GT
Lahan	15 hektar	5 hektar

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat dilihat bahwa kondisi PPP Labuhan Haji sudah sangat sesuai dengan klasifikasi pelabuhan tipe C yang telah ditetapkan pada PERMEN-KP No 8 tahun 2012 tentang kreteria teknis yang dimiliki oleh pelabuhan perikanan pantai maka dari tabel diatas menyatakan bahwa Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji sudah layak disebut sebagai PPP (Pelabuhan Perikanan Pantai).

Pelabuhan perikanan pantai Labuhan Haji adalah salah satu prasarana penunjang perikanan tangkap yang didukung oleh sarana fasilitas pelabuhan perikanan dengan tujuan untuk mempermudah atau memperlancarkan segala bentuk kegiatan perikanan di pelabuhan perikanan. Berdasarkan fasilitas yang tersedia di PPP Labuhan Haji dengan kondisinya antara lain sebagai berikut, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8 Fasilitas pokok PPP Labuhan Haji Yang Tersedia Berserta Kondisinya

No	Fasilitas Pokok	Jumlah	Ukuran yang tersedia	Ukuran yang dimanfaatkan	Kondisi
1	Lahan	1	15 ha	9 hektar	Baik
2	Dermaga Bongkar	1	10 x 150	148 m	Rusak ringan
3	Dermaga Tambat	1	5 x 110	Termanfaatkan semua	Baik
4	Kolam Pelabuhan	1	Luas 10 h dengan kedalaman 3,5 m	4 hektar	Baik
5	<i>Break Water</i>	1	5 x 360 m	Termanfaatkan semua	Baik
6	Talut/ <i>Revertmen</i>	1	150 m	Termanfaatkan semua	Baik
7	Jalan Komplek	1	6 x 300 m	Termanfaatkan semua	Baik
8	<i>Drainase</i>	1	0,5 x 300 m	Termanfaatkan semua	Baik
9	<i>Docking</i>	1	2 x 60 m	Tidak termanfaatkan	Rusak berat

Sumber : Abha, 2021

Fasilitas pokok merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan oleh suatu pelabuhan sebagai tempat berlabuh dan bertambatnya kapal perikanan, fasilitas pokok di Pelabuhan Perikanan Labuhan Haji meliputi. Lahan yang memiliki ukuran seluas 15 hektar dan ukuran yang dimanfaatkan untuk pelabuhan seluas 9 hektar dengan kondisi baik, di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji memiliki 2 (dua) dermaga yaitu dermaga bongkar dengan luas 10x15 m dengan kondisi rusak ringan dan dermaga tambat, dermaga bongkar seluas 5x110 m dengan kondisi baik, kolam pelabuhan memiliki luas 10 hektar dengan kedalaman 3,5 m dengan kondisi baik, luas *break water* 5 x 360 m berkondisi baik, talut/*Revertmmen* berukuran 150 m berkondisi baik, jalan komplek dengan luas 6x300 m berkondisi baik, luas *drainase* 0,5x300 m berkondisi baik dan luas *docking* 2x60 m berkondisi rusak berat.

Menurut PER.08/MEN/2012 kriteria yang harus dipenuhi sebagai Pelabuhan Perikanan Pantai secara umum adalah memiliki fasilitas tambat labuh untuk kapal perikanan sekurang-kurangnya 10 GT, panjang dermaga sekurang-kurangnya 100 m dengan kedalaman kolam pelabuhan sekurang-kurangnya minus 2 m, dan mampu menampung kapal perikanan sekurang-kurangnya 30 unit atau jumlah keseluruhan sekurang-kurangnya 300 GT dan memanfaatkan dan mengelola lahan sekurang-kurangnya 5 ha.

Tabel. 9 Fasilitas fungsional PPP Labuhan Haji Yang Tersedia Berserta Kondisinya

NO	Fasilitas Fungsional	Jumlah	Ukuran yang tersedia	Ukuran yang dimanfaatkan	Kondisi
1	Kantor Administrasi Pelabuhan	-	4 x 16 m	Termanfaatkan semua	Baik
2	Tempat Pelelangan	-	16 x 32 m	Termanfaatkan	Baik

3	Ikan Pabrik Es	-	15 ton / hari	semua Tidak termanfaatkan	Rusak ringan
4	<i>Cold Storage</i>	-	50 ton	Termanfaatkan semua	Baik
5	Unit Pengelolaan Ikan	-	11 unit	Termanfaatkan semua	Rusak ringan
6	Tangki BBM		32 ton	16 ton	Baik
7	Instalasi Air Untuk Kapal	1 unit			Rusak

Sumber : Abha, 2021

Fasilitas fungsional sangat berperan penting dalam keberhasilan pelaksanaan aktivitas dipelabuhan perikanan baik itu untuk persiapan melaut sampai para nelayan mendaratkan hasil tangkapan adapun fasilitas fungsional dipelabuhan perikanan meliputi: Kantor administrasi pelabuhan yang berukuran 4x16 m berkondisi baik, tempat pelelangan ikan berukuran 16x32 m yang berkondisi baik, pabrik es ukuran yang tersedia 15ton/hari berkondisi rusak ringan, *cold storange* ukuran yang tersedia sebanyak 50 ton yang berkondisi baik, unit pengelolaan ikan memiliki 11unit dengan kondisi rusak ringan, tangki BBM ukuran yang tersedia sebanyak 32ton dengan kondisi baik dan memiliki instalasi air sebanyak 1 unit dengan kondisi rusak.

Tabel 10. Fasilitas penunjang PPP Labuhan Haji Yang Tersedia Berserta Kondisinya

	Fasilitas Penunjang	Jumlah	Kondisi
1	Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK)	1 unit	Baik
2	Kantin	2 unit	Baik
3	Parkir	2 unit	Baik
4	Kios	2 unit	Rusak ringan
5	Mushalla	1 unit	Baik
6	Pagar	52 m	Baik
7	Gapura	1 paket	Baik

Sumber. Abha, 2021

Fasilitas Penunjang juga sangat dibutuhkan dipelabuhan perikanan adapun fasilitas penunjang meliputi: Fasilitas Mandi Cuci Kukus (MCK) memiliki 1 unit dengan berkondisi baik, kantin yang ada dipelabuhan perikanan pantai labuhan haji berjumlah 2 unit berkondisi baik, parkir dipelabuhan perikanan pantai labuhan haji memiliki jumlah 2 unit dan berkondisi baik, kios yang ada dipelabuhan perikanan pantai labuhan haji memiliki 2 unit dengan kondisi rusak ringan, mushalla memiliki 1 unit mushalla di pelabuhan perikanan pantai labuhan haji, sedangkan pagar memiliki luas 52 m dengan kondisi baik dan gapura memiliki 1 paket dengan kondisi baik.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Tugas Dan Wewenang Syahbandar

Syahbandar merupakan suatu instansi yang dibangun oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan setiap kapal yang bersandar atau selama kapal perikanan berada di pelabuhan maka kapal wajib mematuhi peraturan untuk menjaga keamanan atau ketertiban pada saat kapal bersandar dipelabuhan, maka pihak syahbandar yang memberikan izin kepada setiap kapal yang akan berlayar dikarenakan kapal yang akan berlayar harus menyiapkan dokumen sebelum melakukan penangkapan ikan, adapun dokumen yang diperlukan adalah Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Tanda Keberangkatan Kapal (STBLKK).

Tugas dan wewenang syahbandar yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji merupakan salah satu hal yang harus ditingkatkan karena dengan adanya tugas dan wewenang syahbandar maka pelabuhan akan semakin meningkat. Karena dengan adanya syahbandar di pelabuhan perikanan pantai labuhan haji sebagai sarana untuk mempermudah para nelayan dalam pembuatan surat menyurat saat melakukan pelayaran.

Keselamatan operasional kapal perikanan yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji bahwa pihak syahbandar di pelabuhan mempunyai tugas dan wewenang. Pelaksanaan tugas dan wewenang syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji yang sesuai dengan hasil penelitian mengenai pelaksanaan wewenang syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji:

1. Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar

Menurut Keputusan Menteri NO.3/PERMEN-KP/2013 tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan, surat persetujuan berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal, laik tangkap, dan laik simpan. Surat persetujuan berlayar berlaku 24 jam sejak diterbitkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan. Nakhoda atau pemilik kapal atau penanggung jawab perusahaan untuk mendapatkan surat persetujuan berlayar, harus mengajukan permohonan kepada Syahbandar di pelabuhan perikanan setelah kapal perikanan siap berlayar.

Surat Persetujuan Berlayar (SPB) merupakan dokumen negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar di pelabuhan perikanan kepada setiap kapal perikanan yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan perikanan. Nahkoda atau pemilik kapal jika ingin berangkat dari Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji maka nelayan terlebih dahulu harus menyiapkan berkas persyaratan administrasi untuk membuat permohonan penerbitan surat persetujuan berlayar. Pelaksanaan wewenang dan tugas syahbandar di pelabuhan perikanan pantai labuhan haji layanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sudah berjalan dengan baik.

Nelayan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji pihak syahbandar tidak mempersulit atau mempersusah para nelayan dalam pembuatan atau penerbitan surat izin dalam berlayar apabila nelayan telah mempersiapkan berkas atau dokumen yang telah ditentukan. Untuk penerbitan SPB, Pemohon harus mengisi surat permohonan dan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan seperti, Surat pernyataan nahkoda, Tanda bukti pembayaran jasa

kepelabuhanan, SLO, Surat Tanda Bukti Laport Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (STBLKK), Buku kesehatan (*health book*), Daftar ABK, Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Kecakapan Nahkoda, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan Kapal Setelah semua berkas diperiksa maka akan dilanjutkan dengan pemeriksaan fisik kapal menggunakan *form checklist* untuk memeriksa kesesuaian pada dokumen dengan yang ada pada kapal secara langsung.

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar yang dilaksanakan oleh Syahbandar harus sesuai dengan Peraturan yang berlaku karena syahbandar bertanggung jawab yang terdapat dalam Permen Kp No 3 Tahun 2013 tentang Kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dimana untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar kapal perikanan harus memenuhi syarat administratif dan syarat teknis nautis. Kurangnya jumlah personil Syahbandar perikanan merupakan suatu kendala, jumlah personil syahbandar perikanan tidak sebanding dengan jumlah pelabuhan perikanan di Indonesia sehingga kementerian kelautan dan Perikanan dan Kementerian Perhubungan melakukan kerja sama untuk menambah jumlah personil Syahbandar di pelabuhan perikanan dengan mengadakan diklat kesyahbandaran (Putri *et al.*2016).

2. Mengatur Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan

Syahbandar dipelabuhan perikanan pada saat mengatur kedatangan kapal perikanan berdasarkan pemberitahuan dari nahkoda kapal perikanan atau pemilik kapal perikanan maka dilakukan secara langsung kepada pihak syahbandar pelabuhan perikanan atau melalui radio komunikasi.

Syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji pada saat mengatur keberangkatan kapal perikanan yang mana sebelumnya nahkoda atau pemilik kapal memberitahukan terlebih dahulu rencana keberangkatan kapal perikanan kepada pihak syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji maka nahkoda atau pemilik kapal terlebih dahulu menyiapkan berkas administrasi kapal perikanan yang akan berlayar. Nelayan Labuhan Haji yang mau berangkat terlebih dahulu pemilik atau nahkoda kapal dua hari sebelum kapal melakukan keberangkatan maka para nelayan melapor atau memberitahukan kepada pihak syahbandar di pelabuhan untuk membuat surat STBLKK keberangkatan kapal. Para nelayan yang akan bersandar di pelabuhan perikanan pantai labuhan haji terlebih dahulu pemilik atau nahkoda kapal harus memberitahukan kepada pihak syahbandar bahwa kapal akan bersandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji baik itu secara langsung maupun melalui radio.

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang mengatur keberangkatan dan kedatangan kapal Aktivitas pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan mempunyai enam kegiatan utama dengan nilai konsekuensi bahaya terbesar pada kegiatan pra dan pasca pengawasan pada tingkat. Adapun saran dari penelitian adalah kegiatan pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan oleh pengawas perikanan harus didukung dengan peralatan keselamatan yang dapat mengurangi konsekuensi bahaya, serta kesiap siagaan dari pengawas perikanan dalam melakukan aktivitas pengawasan kedatangan dan keberangkatan kapal walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan setiap hari (Ismajaya *et al.* 2019).

3. Memeriksa Ulang Kelengkapan Dokumen Kapal Perikanan

Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan gunanya untuk melihat kelengkapan dokumen kapal perikanan pada saat kapal akan bersandar atau tiba di pelabuhan perikanan. Kondisi di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji pihak syahbandar yang memeriksa ulang dokumen kapal sudah berjalan dengan baik akan tetapi masih memiliki kendala dikarenakan di Pelabuhan Perikanan pantai Labuhan Haji masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM). Pemeriksaan ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan ini gunannya untuk melihat kelengkapan kapal perikanan ketika kapal perikanan bersandar di pelabuhan perikanan pantai labuhan haji.

4. Memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan dan alat bantu penangkapan ikan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung dilapangan pihak Syahbandar belum sepenuhnya melakukan cek teknis dan nautis kesemua kapal perikanan dikarenakan masih kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) dibidang syahbandar, dan cek teknis atau nautis kapal perikanan juga tidak memungkinkan jika dilakukan satu persatu-persatu kapal perikanan dikarenakan jumlah dan anggota staf syahbandaran yang jumlahnya sedikit dan juga akan memakan waktu yang cukup lama. Maka dalam hal ini syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji masih banyak kurang dalam memeriksa teknis dan nautis kapal dikarenakan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) syahbandar yang ada di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji

5. Melaksanakan pencarian dan penyelamatan

Syahbandar dipelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan bantuan penyelamatan dan pencaharian itu merupakan salah satu tindakan awal terhadap musibah yang terjadi saat pelayaran. Di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji, dalam melakukan pencarian dan menolong korban kecelakaan dan tenggelam dilaut tentunya ada kerja sama pihak syahbandar dengan instansi- instansi yang terkait lainnya seperti, TNI Al/marinir, Polairut, PSDKP Pengawasan, BPBK/bencana alam, panglima laot kabupaten dan panglima laot kecamatan.

Menurut hasil wawancara dengan pihak syahbandar tentang pengisian logbook maupun tugas dan wewenang syahbandar lainnya sudah lama ingin dilaksanakan, namun akan tetapi berhubungan dengan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) masih banyak tugas dan wewenang yang belum terlaksanakan oleh pihak syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji.

5.1.1 Customer satisfaction index (CSI)

Pengukuran tingkat kepuasan nelayan terhadap wewenang syahbandar sangat penting dilakukan untuk mengetahui seberapa besar harapan yang dipenuhi oleh Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Labuhan Haji. Adapun analisis CSI digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan secara keseluruhan dengan memperhatikan tingkat kepentingan dan kinerja dari atribut-atribut produk atau jasa. Analisis kepuasan nelayan secara keseluruhan dilakukan dengan menghitung nilai *Customer satisfaction index (CSI)*. Jumlah total dari WS dibagi dengan 5 tugas wewenang syahbandar yang dijalankan di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji dikali 100%.

Tabel 11. Hasil perhitungan CSI kepuasan nelayan terhadap wewenang syahbandar.

No	Variabel	Atribut	MIS	WF	WS	
1	Mengatur Kedatangan Kapal perikanan	Memberikan kenyamanan fasilitas yang ada dikantor syahbandar	h1 2,15	5,55	24,17	
		Memberikan layanan informasi yang jelas oleh syahbandar	h2 2,28	5,91	25,71	
		Mengarahkan pelayanan fasilitas docking saat kedatangan kapal	h3 2,59	6,70	29,08	
		SOP (Standar Operasional Prosedur) pelayanan yang digunakan dalam kegiatan pembuatan surat menyurat untuk keberangkatan kapal	h4 2,09	5,41	21,69	
2	Memeriksa ulang kelengkapan dokumen Kapal Perikanan	Memberikan kenyamanan layanan saat memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal	h5 2,73	7,05	28,77	
		Ketelitian petugas dalam pemeriksaan ulang dokumen kapal	h6 3,34	8,64	35,83	
3	Menerbitkan surat tanda bukti lapor kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan	Kecepatan petugas dalam menanggapi pelayanan pembuatan STBLKK	h7 3,52	9,11	37,78	
		Memberikan kenyamanan nelayan dalam pelayanan penerbitan dokumen kelengkapan kapal	h8 3,94	10,20	42,06	
4	Mengatur keberangkatan kapal perikanan	Memeriksa rencana keberangkatan kapal dari nahkoda atau pemilik kapal	h9 3,48	8,99	36,58	
		Memberikan kecepatan pelayanan keberangkatan dalam penerbitan SPB oleh petugas syahbandar	h10 3,00	7,76	32,09	
5	Menerbitkan surat persetujuan berlayar	Memeriksa kelengkapan persyaratan dokumen kesiapan dan bukti pemenuhan kewajiban kapal akan berlayar	h11 3,18	8,23	33,94	
		kesigapan syahbandar dalam memberikan pelayanan penerbitan sipi	h12 3,49	9,02	37,21	
		Pengetahuan petugas terhadap pelayanan dalam penerbitan SIUP	h13 2,88	7,43	30,58	
			Jumlah	38,67	WT	415,51
CSI				83,1		

Sumber: Data primer yang diolah, 2021

Hasil analisis menunjukkan nilai CSI pada wewenang syahbandar di Pelabuhan Perikanan Labuhan Haji yang diperoleh adalah 83,1% (sangat puas). Berdasarkan hasil analisis nilai CSI tugas wewenang syahbandar di Pelabuhan

Perikanan Pantai Labuhan Haji sudah merasa sangat puas terhadap layanan tugas wewenang syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji karna nilai tersebut berada pada selang 0,81-1,00. *Customer Satisfaction Index* digunakan untuk menentukan tingkat atribut dan perangkat pelayanan wewenang syahbandar secara menyeluruh dengan pendekatan tingkat kepetingan dari atribut yang diukur.

5.1 Pembahasan

Pengukuran pada CSI menunjukkan nilai pada wewenang syahbandar di Pelabuhan Perikanan Labuhan Haji yang diperoleh adalah 83,1% (sangat puas). Berdasarkan hasil analisis nilai CSI tugas wewenang syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji sudah merasa puas dengan terhadap layanan tugas wewenang syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji karna nilai tersebut berada pada selang 0,81-1,00. *Customer Satisfaction Index* digunakan untuk menentukan tingkat atribut dan perangkat pelayanan wewenang syahbandar secara menyeluruh dengan pendekatan tingkat kepetingan dari atribut yang diukur.

Berdasarkan dimensi yang pertama tentang Mengatur Kedatangan Kapal Perikanan terdapat 4 (empat) pertanyaan dari keempat pertanyaan dari dimensi tersebut nilai yang tertinggi dengan skor 6,7 sedangkan nilai yang terendah dari dimensi pertama dengan skor 2,59. Berdasarkan dimensi yang kedua tentang Memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan memiliki 2 (dua) pertanyaan skor yang paling tinggi adalah 8,64 dan skor rendah 3,34. Berdasarkan dimensi yang ketiga tentang Menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal Perikanan. Memiliki 2 (dua) pertanyaan yang mana

dari pertanyaan tersebut memiliki skor nilai tertinggi adalah 10,2 dan skor terendah adalah 3,49. Dimensi yang keempat yaitu tentang Mengatur keberangkatan kapal perikanan 2 (dua) pertanyaan yang mana dari dua pertanyaan tersebut memiliki nilai skor tertinggi yaitu 8,99 dan nilai skor terendah bernilai 3,48, dimensi yang kelima atau dimensi yang terakhir tentang Menerbitkan surat persetujuan memiliki 3 (tiga) pertanyaan dan memiliki nilai skor tertinggi yaitu 9,02 dan skor terendah 3,49. Dan nilai CSI nya berjumlah 83,1% yang dikategorikan sangat puas.

Dalam hal ini sesuai dengan penelitian Ukkas (2019), dengan judul penelitiannya mengenai studi tentang administrasi dokumen keluar masuk kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, Sulawesi Tenggara. Penelitiannya menyatakan bahwa PPS Kendari adalah suatu pelabuhan perikanan tipe A di Indonesia yang memiliki peranan dalam melayani para nelayan mengenai administrasi dalam produksi dan panen hasil perikanan. Adapun kegiatan administrasi keluar masuk kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari di mulai dari Nakhoda atau pengurus kapal mengurus Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan Kapal (STBLK), E-Log Book Perikanan Tangkap, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal (STBLKK), Surat Laik Operasi dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) di Kantor Pelayanan Terpadu (Seksi Kesyahbandaran) dengan membawa kelengkapan dokumen-dokumen kapal tetap maupun penunjang.

Menurut penelitian Nurhayatin (2016), dengan judul penelitiannya Analisis Tingkat Kepuasan Nelayan Terhadap Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Melaut di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur.

Dengan metode penelitian *CSI (Customer Satisfaction Index)* Secara keseluruhan fasilitas pokok, fasilitas fungsional dan fasilitas penunjang yang ada di PPN Prigi kondisinya baik, tetapi belum berfungsi sebagaimana fungsinya pada tingkat kepuasan nelayan di PPN Prigi didapatkan hasil dari perhitungan CSI masing-masing atribut pelayanan yaitu 0,55 (solar), 0,73 (air bersih), 0,62 (es), dimana hal tersebut dikatakan nelayan cukup puas terhadap pelayanan kebutuhan melaut tersebut, pada atribut yang memiliki prioritas tertinggi dari tiga kebutuhan melaut untuk ditingkatkan pelayanannya yaitu ketersediaan jumlah produk dan sistem penerimaan keluhan.

Berdasarkan hasil perhitungan dari indeks kepuasan wewenangan kesyahbandaran dan melayani para nelayan di pelabuhan perikanan pantai (PPP) Labuhan Haji Kecamatan Aceh Selatan (83,1%). Nilai ini mencerminkan bahwa secara keseluruhan nelayan merasa puas terhadap kinerja pelayanan wewenangan syahbandar dalam melayani para nelayan di pelabuhan perikanan pantai (PPP) Labuhan Haji Kecamatan Aceh Selatan. Namun penilaian puas belum berarti pihak penyedia layanan kepuasan wewenangan kesyahbandaran dalam melayani para nelayan tidak perlu meningkatkan lagi kinerjanya, masih terdapat beberapa atribut yang dirasakan penting oleh nelayan tetapi nilai kinerjanya dinilai masih kurang. Pelayanan kantor kesyahbandaran harus lebih ditingkatkan lagi dalam melayani para nelayan di pelabuhan perikanan pantai (PPP) Labuhan Haji Kecamatan Aceh Selatan terutama kinerjanya agar nilai indeks kepuasan nelayan mencapai 100%.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis menunjukkan nilai CSI pada wewenang syahbandar di Pelabuhan Perikanan Labuhan Haji yang diperoleh adalah 83,1% (sangat puas). Berdasarkan hasil analisis nilai CSI tugas wewenang syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji sudah merasa puas dengan terhadap layanan tugas wewenang syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji karna nilai tersebut berada pada selang 0,81-1,00. *Customer Satisfaction Index* digunakan untuk menentukan tingkat atribut dan perangkat pelayanan wewenang syahbandar secara menyeluruh dengan pendekatan tingkat kepetingan dari atribut yang diukur.

6.2 Saran

Perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dibidang syahbandar di Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji, supaya tugas dan wewenang syahbandar semuanya terlaksanakan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abha. H. 2021. Analisis Tempat Pemanfaatan Fasilitas Pelabuhan Perikanan Pantai Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan. [Skripsi]. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan. Universitas Teuku Umar. (tidak dipublikasikan).
- Amri, H. R., & Subagio, R. T. 2020. Penerapan Metode CSI untuk Pengukuran Tingkat Kepuasan Layanan Manajemen. *Jurnal Sistem Cerdas*. 3(3): 241-252.
- Dinas Kelautan Dan Perikanan Aceh Selatan. 2020. *Laporan Tahunan*. DKP Aceh Selatan.
- Fheruati. 2004. Analisis Tingkat Kepuasan Pengunjung Taman Safari Indonesia, Ciruas Bogor. [Skripsi]. Departemen Statistik, Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor. (Tidak Dipublikasikan).
- Lubis, E. 2012. *Pelabuhan Perikanan*. Bogor. PT. Penerbit IPB Press.
- Martinus. 2006. *Pelabuhan Perikanan Aspek Teknik dan Penyelenggaraanya*. Malang: Universitas Brawijaya.
- Menteri Kelautan dan Perikanan. 2012. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 08/MEN/2012 tentang Pelabuhan Perikanan Jakarta. Kementrian Kelautan dan Perikanan.
- Menteri Kelautan dan Perikanan. 2013. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 03/MEN/2013. Tentang Kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan. Jakarta. Kementrian Kelautan dan Perikanan.
- Nurhayatin, O. T., Mudzakir, A. K. & Wibowo, B. A. (2016). Analisis Tingkat Kepuasan Nelayan terhadap Pelayanan Penyediaan Kebutuhan Melaut di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management And Technology*. 5 (1): 19-27.
- Nurmala. 2020. Kinerja Lembaga Adat Dalam Pengelolaan Perikanan *Purse Seine* di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Sawang Ba'u, Aceh Selatan.[Skripsi]. Fakultas Perikanan Dan Ilmu Kelautan.Universitas Teuku Umar. (tidak dipublikasikan).

- Nurmaya, P. A. S. 2016. Fungsi Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Sebagai Sarana Pendukung Industri Perikanan di Jakarta Utara. *Diponegoro Law Journal*. 5(4): 1-17.
- Padang, A.W.R. Luasanaug, A. & Kayade, M.E. 2019. Kegiatan kesyahbandaran di pangkalan pendaratan ikan kema Minahasa utara. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap*. 4(2): 75-78.
- Patimah, S. Priyono, B. S. & Rasyid, W. 2016. Analisis Tingkat Konsumen Terhadap Pelayanan Usaha Benih Padi Cigeulis Di Balai Induk Padi Dan Palawija Di Kabupaten Kapahiang Provinsi Bengkulu. *Agrisep*. 15(2): 03-12.
- Pemerintah Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No 4849 Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2009. Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Lembaran Negara RI Tahun 2009, No 5073 Sekretariat Negara. Jakarta.
- Putri, E. N., Soemarmi, A. & Hartono, D. U. 2016. Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Syahbandar Dalam Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Kapal Perikanan. *Diponegoro Law Journal*. 5 (3): 1-8.
- Razaq, M. 2020. Analisis Indeks Kinerja Pengelolaan Dan Indeks Kepuasan Pengguna Dipelabuhan Perikanan Labuhan Haji, Aceh Selatan. [Skripsi]. Fakultas Ilmu Kelautan Dan Perikanan Universitas Syiah Kuala Darussalam, Banda Aceh. (tidak dipublikasikan).
- Setiawan, K. 2018. Peran syahbandar dalam penerapan standar keamanan pelayaran di pelabuhan Sri Mandah Kecamatan Moro. [Skripsi] Program Studi Ilmu Pemerintahan. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Negeri Maritim Raja Ali haji. Tanjung Pinang. (tidak dipublikasikan).
- Siyoto. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Literalis Media Publishing. Yogyakarta.
- Turang, V. S., Kayadoe, M. E. & Panggalila, F.P.T. 2019. Kajian Tugas dan wewenang kesyahbandaran pelabuhan perikanan pantai (PPP) Tumumpa. *Jurnal Ilmu Dan Teknologi Perikanan Tangkap*. 4(1): 10-15.

- Ukkas, R. 2019. Studi Tentang Administrasi Dokumen Keluar Masuk Kapal Perikanan Di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Kendari, Sulawesi tengara.[Skripsi]. Jurusan Teknologi Pengkapan Ikan Politeknik Pertanian Negeri Pangkep. (tidak dipublikasikan).
- Umam, R. P. & Hariastuti, N. P. 2018. Analisis kepuasan pelanggan dengan menggunakan metode Customer Satisfaction Inde (CSI) dan importance performannce analysis (IPA). Seminar Nasional Sains dan Teknologi terapanvi VI 2018. Institut Teknologi Adhi Tama. Surabaya.

LAMPIRAN

Lampiran 1

➤ **Data Kapal Yang Memiliki SIPI Di PPP Labuhan Haji**

Berdasarkan tabel dibawah ini menjelaskan bahwa nelayan labuhan Haji yang memiliki surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) selama tahun 2020-2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Nama pemilik kapal	Pangkalan/TPI	Gros Tone (GT)		Presentase (%)
1	Azman	PPP Labuhanhaji	<5 GT	2	72%
2	Lela Wati	PPP Labuhanhaji		2	
3	Junaidi	PPP Labuhanhaji		2	
4	Said M.Nur	PPP Labuhanhaji		3	
5	Zuhra Aman	PPP Labuhanhaji		3	
6	Azhar	PPP Labuhanhaji		3	
7	Jefri	PPP Labuhanhaji		3	
8	Ernita	PPP Labuhanhaji		3	
9	Rusliadi	PPP Labuhanhaji		3	
10	Ilyas	PPP Labuhanhaji		3	
11	Pendi Saputra	PPP Labuhanhaji		4	
12	Mahdinur	PPP Labuhanhaji		4	
13	Ainun Amin	PPP Labuhanhaji		4	
14	Syah Rizal	PPP Labuhanhaji		4	
15	Ibnu Hajar	PPP Labuhanhaji		4	
16	M. Ishardi	PPP Labuhanhaji		4	
17	Fendi Saputra	PPP Labuhanhaji		4	
18	Safaruddin	PPP Labuhanhaji		4	

19	Ramli	PPP Labuhanhaji		4	
20	Zairi	PPP Labuhanhaji		4	
21	H. Masri Ali	PPP Labuhanhaji		4	
22	H. Masri Ali	PPP Labuhanhaji		4	
23	Irwan Yus	PPP Labuhanhaji		5	
24	nurdin	PPP Labuhanhaji		5	
25	jauhari	PPP Labuhanhaji		5	
26	Mahyudin	PPP Labuhanhaji		5	
27	Said Supardi	PPP Labuhanhaji	5 - 20 GT	6	22%
28	Syarifah Fajrianur	PPP Labuhanhaji		6	
29	Zulkarnaen	PPP Labuhanhaji		6	
30	Masturudi	PPP Labuhanhaji		9	
31	Aris Mulya. S.PD	PPP Labuhanhaji		9	
32	Said Hermanizar	PPP Labuhanhaji		10	
33	T.Ahmad Tarmizi	PPP Labuhanhaji		16	
34	Yulizar	Pangkalan/TPI		18	
35	Miswar	PPP Labuhanhaji	>20 GT	25	6%
36	Syafi'i Syeh	PPP Labuhanhaji		53	

➤ **Data STBLKK Keberangkatan Di PPP Labuhan Haji**

Petugas syahbandar memiliki tugas menerbitkan surat-surat yang mengurus oleh nelayan yang di PPP Labuhan Haji salah satunya adalah mengatur kedatangan kapal atau Surat Tanda Bukti Keberangkatan Kapal (STBLKK), dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	STBLKK (Nomor)	Nama Kapal	GT	
1	51-04-III-STBLKK-B-2021	LUTHFI	6	<10 GT
2	62-17-III-STBLKK-B-2021	PRIMADONA 4	6	
3	69-24-III-STBLKK-B-2021	MANDIRI	6	
4	77-29-III-STBLKK-B-2021	PRIMADONA 4	6	
5	53-08-III-STBLKK-B-2021	ARDATH - 02	9	

6	59-15-III-STBLKK-B-2021	AURA BUANA	9	10 - 30 GT
7	61-17-III-STBLKK-B-2021	SEULANGA 01	9	
8	72-25-III-STBLKK-B-2021	AURA BUANA	9	
9	50-09-III-STBLKK-B-2021	REKOT ATRA	10	
10	81-30-III-STBLKK-B-2021	MITA RESEUKI	10	
11	57-13-III-STBLKK-B-2021	NELAYAN 2017 804	11	
12	75-29-III-STBLKK-B-2021	ARAFAH-4	16	
13	54-08-III-STBLKK-B-2021	SEULAWAH JANTAN	18	
14	48-01-III-STBLKK-B-2021	HAMMER	25	
15	63-19-III- STBLKK- B- 2021	HAMMER	25	
16	76-29-III-STBLKK-B-2021	HAMMER	25	
17	68-23-III-STBLKK-B-2021	MADINAH	26	
18	49-01-III-STBLKK-B-2021	MERPATI	30	
19	70-25-III-STBLKK-B-2021	ANUEK LINGGA 2	30	
20	78-29-III-STBLKK-B-2021	MERPATI	30	
21	60-16-III-STBLKK-B-2021	PAKAR JAYA 01	36	
22	52-08-III-STBLKK-B-2021	ADEK ABANG-02	37	
23	65-21-III-STBLKK- B- 2021	ADEK ABANG-02	37	
24	80-30-III-STBLKK-B-2021	LIBERTI 01	37	
25	58-12-III-STBLKK-B-2021	MUKSALMINA	39	
26	55-12-III-STBLKK-B-2021	OEN IJOE BAROE 01	40	
27	67-23-III-STBLKK-B-2021	BINTANG PURNAMA	45	
28	66-23-III-STBLKK-B-2021	MUSTIKA	46	
29	56-13-III-STBLKK-B-2021	SHINDA	53	
30	71-26-III-STBLKK-B-2021	NURI 02	53	
31	79-29-III-STBLKK-B-2021	SEULANGA 01	53	
32	64-19-III-STBLKK-B-2021	POCUT NURI	59	>30 GT

➤ **Data STBLKK Kedatangan Di PPP Labuhan Haji**

Petugas syahbandar memiliki tugas menerbitkan surat-surat yang diurus oleh nelayan yang di PPP Labuhan Haji salah satunya adalah mengatur kedatangan kapal atau Surat Tanda Bukti Kedatangan Kapal (STBLKK), dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	STBLKK (Nomor)	Nama Kapal	GT Kapal	Operasi Penangkapan	API	Jenis Ikan	
1	51-04-III-STBLKK-D-2021	LUTHFI	6	WPP 572	PANCING	Tongkol	
2	62-17-III-STBLKK-D-2021	PRIMADONA 4	6	WPP 572	PANCING	Tongkol	
3	69-24-III-STBLKK-D-2021	MANDIRI	6	WPP 572	PANCING	Tongkol, Layang, Sisik	
4	77-29-III-STBLKK-D-2021	PRIMADONA 4	6	WPP 572	PANCING	Tongkol, Sisik, Layang	
5	53-08-III-STBLKK-D-2021	ARDATH – 02	<10 GT	9	WPP 572	PANCING	Tongkol,Layang
6	59-15-III-STBLKK-D-2021	AURA BUANA		9	WPP 572	PURSE SEINE	Tongkol
7	61-17-III-STBLKK-D-2021	SEULANGA 01	9	WPP 572	PANCING	Tongkol, Layang	
8	72-25-III-STBLKK-D-2021	AURA BUANA	9	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol, Kembung, Campu	
9	50-09-III-STBLKK-D-2021	REKOT ATRA	10	WPP 572	PANCING	Tongkol, Sisik, layang	
10	81-30-III-STBLKK-D-2021	MITA RESEUKI	10	WPP 572	PANCING	Tongkol, Cakalang, Campuran	
11	57-13-III-STBLKK-D-2021	NELAYAN 2017 804	11	WPP 572	PANCING TONDA	Tongkol	
12	75-29-III-STBLKK-D-2021	ARAFAH-4	16	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol, Layang	
13	54-08-III-STBLKK-D-2021	SEULAWAH JANTAN	10 - 30 GT	18	WPP 572	PANCING	Layang, Tongkol
14	74-29-III-STBLKK-D-2021	INDAH SAKTI -01		18	WPP 572	PANCING	Tongkol, Campuran
15	48-01-III-STBLKK-D-2021	HAMMER	25	WPP 572	PANCING	Tongkol	
16	63-19-III- STBLKK- D-2021	HAMMER	25	WPP 572	PANCING	Tongkol, Sisik	
17	76-29-III-STBLKK-D-2021	HAMMER	25	WPP 572	PANCING	Tngkol, Layang, Cakalang	
18	68-23-III-STBLKK-D-2021	MADINAH	26	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol , Selayang	

19	49-01-III-STBLKK-D-2021	MERPATI		30	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol, Layang
20	70-25-III-STBLKK-D-2021	ANUEK LINGGA 2		30	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol, Campuran
21	78-29-III-STBLKK-D-2021	MERPATI		30	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol, Layang, Cakalang, Campuran
22	60-16-III-STBLKK-D-2021	PAKAR JAYA 01		36	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol
23	52-08-III-STBLKK-D-2021	ADEK ABANG-02		37	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol
24	65-21-III-STBLKK- D-2021	ADEK ABANG-02		37	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol, Layang
25	80-30-III-STBLKK-D-2021	LIBERTI 01		37	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol, Layang, Campuran
26	58-12-III-STBLKK-D-2021	MUKSALMINA		39	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol, Layang, sisik, Campuran
27	55-12-III-STBLKK-D-2021	OEN IJOE BAROE 01	>30 GT	40	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol, Layang
28	67-23-III-STBLKK-D-2021	BINTANG PURNAMA		45	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol, Sisik, Layang
29	66-23-III-STBLKK-D-2021	MUSTIKA		46	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol Layang
30	56-13-III-STBLKK-D-2021	SHINDA		53	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol,Layang
31	71-26-III-STBLKK-D-2021	NURI 02		53	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol, Sisik, Cakalang
32	79-29-III-STBLKK-D-2021	SEULANGA 01		53	WPP 572	PANCING	Tongkol, Campuran
33	64-19-III-STBLKK-D-2021	POCUT NURI		59	WPP 572	PS. PELAGIS KECIL 1 KAPAL	Tongkol, Layang

Lampiran 2. Dokumentasi penelitian

Pengambilan data sekunder di DKP Aceh Selatan



Wawancara bersama nelayan di PPP Labuhan Haji







Lampiran. Data Responden

No	Nama	Usia	Alamat	Pekerjaan	Jenis alat tangkap
1	Asmadi	60 tahun	Labuhan haji barat, Ds kuta ie boeh	Nelayan pemilik	Jaring insang
2	M. Ubah	55 tahun	Labuhan haji Ds Ujung padang	Nelayan penuh	jaring/pancing
3	Pendi	30 tahun	Labuhan Haji Barat, Ds ujung padang	Nelayan penuh	jaring/pancing
4	Hadi	40 tahun	Blang Pidie	Nelayan penuh	Pancing
5	Jakir Darma	46 tahun	Krung bate	Nelayan penuh	Pancing
6	Putra	23 tahun	Manggeng	Nelayan penuh	Pancing
7	Marzuki	30 tahun	Manggeng	Nelayan penuh	Pancing
8	Jefri	29 tahun	Abdya	Nelayan penuh	Pancing
9	Zaini Zami	45 tahun	Labuhan Haji tengah, Ds. Padang bakau	Nelayan penuh	Pancing
10	Salman	43 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Blang poroh	Nelayan penuh	Pancing
11	M. Yunan	50 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Blang baru	Nelayan penuh	Pancing
12	Yahya	50 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Suak lokan	Nelayan pemilik	Pancing
13	Rais Saputra	34 tahun	Labuhan haji tengah, Ds. Pawoh	Nelayan pemilik	Pancing
14	Safaruddin	41 tahun	Labuhan Haji Barat, Ds pasar lama	Nelayan penuh	Pancing
15	Mukti	30 tahun	Labuhan haji tengah, Ds. Pasar lama	Nelayan penuh	Pancing
16	Jainal Abidin	62 tahun	Labuhan haji timur, Keumumu hilir	Nelayan penuh	Pancing
17	Doli Hasiah	34 tahun	Labuhan haji, Ds. Kampung pisang	Nelayan penuh	Pancing
18	Zulkifli	58 tahun	Labuhan Haji Barat, Ds pasar lama	Nelayan penuh	Pancing
19	Syawal	25 tahun	Labuhan Haji tengah, Ds. Padang bakau	Nelayan penuh	Pancing
20	Kafrianti	57 tahun	Labuhan Haji tengah, Ds. Padang bakau	Nelayan penuh	Pancing
21	Hasanuddin	60 tahun	Labuhan haji timur, Keumumu hilir	Nelayan penuh	Pancing

22	Hendra	23 tahun	Labuhan Haji tengah, Ds. Padang bakau	Nelayan penuh	Pancing
23	Nuryadi	50 tahun	Labuhan Haji Barat, Ds pasar lama	Nelayan penuh	Pancing
24	Madi	43 tahun	Labuhan haji timur, Ds Sawang indah	Nelayan penuh	Pancing
25	Sukardi	30 tahun	Labuhan haji timur, Ds. Sawang indah	Nelayan penuh	Pancing
26	Ahyar	22 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Blang poroh	Nelayan penuh	Pancing
27	Kasman	32 tahun	Labuhan haji	Nelayan penuh	Pancing
28	Basri	35 tahun	Labuhan haji	Nelayan penuh	Pancing
29	Jauhari	55 tahun	Labuhan haji, Ds. Bakau hulu	Nelayan penuh	Pancing
30	Ubat	61 tahun	Labuhan haji timur, Ds. Paya peulumat	Nelayan penuh	Pancing
31	Ismail	64 tahun	Labuhan haji, Blang keujeren	Nelayan penuh	Pancing
32	Racidin	64 tahun	Labuhan haji timur, Ds. Paya peulumat	Nelayan penuh	Pancing
33	Masrizal	40 tahun	Labuhan Haji, Ds pasar lama	Nelayan penuh	Pancing
34	Kaharuddin	45 tahun	Labuhan Haji tengah, Ds. Padang bakau	Nelayan penuh	Pancing
35	Jauhari	52 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Tutong	Nelayan penuh	Pancing
36	M. Ilyas	59 tahun	Labuhan haji timur, Ds. Paya peulumat	Nelayan penuh	Pancing
37	Muzakir	25 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Blang poroh	Nelayan penuh	Pancing
38	Arianda	29 tahun	Labuhan haji timur, Peulumat	Nelayan penuh	Purse saine
39	Mahmud	36 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Blang poroh	Nelayan penuh	Purse saine
40	Muzakir	26 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Blang baru	Nelayan penuh	Purse saine
41	Riswan	39 tahun	Labuhan haji	Nelayan penuh	Purse saine
42	Reko	27 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Pulo ie	Nelayan penuh	Purse saine
43	Mardi	20 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Blang baru	Nelayan penuh	Purse saine
44	Kairi	28 tahun	Labuhan Haji, Ds pasar lama	Nelayan penuh	Purse saine

45	Herman	34 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Blang poroh	Nelayan penuh	Purse saine
46	Riswan	36 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Kuta ie boeh	Nelayan penuh	Purse saine
47	Basir	30 tahun	Labuhan Haji, Ds pasar lama	Nelayan penuh	Purse saine
48	Nurdin	33 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Blang baru	Nelayan penuh	Purse saine
49	Abdul Rauf	34 tahun	Labuhan Haji, Ds. Pulo ie	Nelayan penuh	Purse saine
50	Ikhsan Firdaus	28 tahun	lhok pawoh sawang	Nelayan penuh	Purse saine
51	Mahdinur	44 tahun	Labuhan Haji, Ds pasar lama	Nelayan pemilik	Bagan
52	Nurhadi	53 tahun	Labuhan Haji, Ds pasar lama	Nelayan penuh	Bagan
53	H. Masri	50 tahun	Labuhan haji, Ds kuta ie boeh	Nelayan penuh	Bagan
54	Ilyas	53 tahun	Labuhan haji, Ds. Ujung padang	Nelayan penuh	Bagan
55	Samsul Bahri	57 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Kuta ie boeh	Nelayan penuh	Jaring
56	Nyak Tanda	60 tahun	Labuhan Haji, Ujung batu	Nelayan pemilik	Jaring
57	M. Nasir	48 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Blang poroh	Nelayan pemilik	Jaring
58	Sulaiman	60 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Kuta ie boeh	Nelayan penuh	Jaring
59	Arimas	38 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Kutatrieng	Nelayan penuh	Jaring
60	Samsul Bahri	40 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Blang poroh	Nelayan penuh	Jaring
61	Abukari	58 tahun	Labuhan haji, Ds. Tuton	Nelayan penuh	Jaring
62	Wahyu	40 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Blang poroh	Nelayan penuh	Jaring
63	Ruslan	60 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Ujung padang	Nelayan penuh	Jaring
64	Dosamat	60 tahun	Labuhan Haji, Ds. Pulo ie	Nelayan penuh	Jaring
65	Zulkifli	52 tahun	Labuhan haji, Ds kuta ie boeh	Nelayan penuh	Jaring
66	Abdul Rajab	50 tahun	Labuhan haji, Ds kuta ie boeh	Nelayan penuh	Jaring
67	Muslim	48 tahun	Labuhan haji, Ds kuta ie boeh	Nelayan penuh	Jaring
68	Ilyas PW	63 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Blang poroh	Nelayan penuh	Jaring

69	Feri Nanda	29 tahun	Manggeng	Nelayan penuh	Purse saine
70	Sapriadi	30 tahun	Susoh	Nelayan penuh	Purse saine
71	Sardi	38 tahun	Manggeng	Nelayan penuh	Purse saine
72	Nyakcut	43 tahun	Susoh	Nelayan penuh	Purse saine
			Labuhan haji timur, Ds.Tengah pelumat		
73	T. Amunaidi Arta	20 tahun		Nelayan pemilik	Purse saine
74	Razali Sulaiman	60 tahun	Idie rayek aceh timur	Nelayan penuh	Purse saine
75	Iwan	35 tahun	Meukek	Nelayan penuh	Purse saine
76	Syarwani	43 tahun	Meukek	Nelayan pemilik	Purse saine
77	Asrijal	30 tahun	Meukek	Nelayan pemilik	Purse saine
78	Adi	28 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Blang poroh	Nelayan penuh	Purse saine
79	Andika	27 tahun	Labuhan Haji barat, Ds Tutong	Nelayan penuh	Purse saine
			Labuhan haji timur, Ds.Tengah pelumat		
80	Husen	43 tahun		Nelayan penuh	Purse saine
81	M. Jalil	40 tahun	Labuhan Haji barat, Blang kejeran	Nelayan penuh	Purse saine
82	Syahril	24 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Kuta ie boeh	Nelayan penuh	Purse saine
83	Hasan	32 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Kuta ie boeh	Nelayan penuh	Purse saine
84	Aan	26 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Teugah ie boeh	Nelayan penuh	Purse saine
85	Agus	33 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Suak lokan	Nelayan penuh	Purse saine
86	Saputra	34 tahun	Labuhan Haji, Ds. Pulo ie	Nelayan penuh	Purse saine
87	Ahmad	35 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Blang poroh	Nelayan penuh	Purse saine
88	Saiful MZ	55 tahun	Labuhan haji barat, Ds. Blang poroh	Nelayan penuh	Purse saine

Lampiran Kuesioner

A. Data Responden

- Nama :
- Alamat :
- Asal :
- Lama tinggal di labuhanhaji:
- Usia : tahun
- Pendidikan terakhir : () SD () SMP () SMA () S1 () S2 () S3
- Jenis Kelamin : () Laki-laki () Perempuan
- Status : () Menikah, anak ...orang
() Belum menikah
- Pekerjaan :
- Jika nelayan:
- a) Nelayan pemilik () buruh ()
- b) () nelayan penuh () sambilan utama
() sambilan sampingan, keterangan.....
- c) Jenis alat tangkap:

• Data Unit Penangkapan

1. Kapal

- Status Kepemilikan : milik sendiri/bantuan pemerintah/bantuan swasta.
- Jenis kapal : () jukung () perahu () motor tempel () kapal motor
- Ukuran panjang :
- Lebar :
- Tinggi :
- Jenis Mesin : Dalam/luar, Merk..... Harga.....
- Daya mesin :.....HP
- Material Kapal :
- Kapal dilengkapi palkah : () ya () tidak
- Umur teknis kapal :tahun
- Kapasitas kapal :
- Tempat membeli kapal/mesin :
- Berapa waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali trip:
...jam,hari
- Jumlah trip per bulan :
- Dalam satu tahun berapa bulan melaut :
- Jenis alat tangkap yang digunakan:

2. Alat Tangkap

- Jenis alat tangkap:

- Apakah alat tangkap tersebut dibeli ? () Ya () Tidak

- Jika ya, bagaimana cara pembeliannya ?

() Kontan () Kredit () Lainnya:

- Harga alat tangkap siap pakai: Rp.....

- Tempat membeli bahan/alat tangkap

B.KUESIONER UNTUK NELAYAN (Kepentingan)

Berikan *tick mark* (✓) pada kolom yang anda anggap tepat.

No	Pertanyaan	Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Apakah Bapak Puas Terhadap Layanan Dalam Penerbitan/Pembuatan SPB					
2	Apakah bapak puas terhadap layanan dalam penerbitan/pembuatan SIPI					
3	Apakah bapak puas dalam penerbitan/pembuatan SIUP					
4	Apakah bapak puas dengan keadaan fasilitas yang ada dikantorr syahbandar					
5	Bagaimana pihak syahbandar dalam melakukan pelayanan terhadap docking kapal?					
6	Apakah bapak puas dalam layanan informasi yang diberikan oleh pihak syahbandar ppp labuhan haji					
7	Apakah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang digunakan dalam kegiatan pembuatan surat menyurat untuk keberangkatan kapal?					

8	Baigamana pendapat bapak tentang kegiatan pengawasan petugas syahbandar dipelabuhan perikanan labuhan haji?					
9	Apakah bapak puas dengan layanan/keramahan petugas syahbandar terhadap nelayan di PPP labuhan haji?					
10	Apakah bapak puas dengan layanan/keramahan petugas syahbandar terhadap para nelayan di PPP labuhan haji					
11	Bagaimana mengenai pemeriksaan dokumen pada saat kedatangan kapal					
12	Bagaimana tugas dan fungsi kewewengan serta pengawasan pihak syahbandar dalam rangka meningkatkan keamanan dan pelayaran					
13	Bagaimana tugas dan wewenang syahbandar dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan dilaut?					

Keterangan Score Penilaian :

Kriteria		Nilai
Sangat Baik	Sangat Puas	5
Baik	Puas	4
Sedang	Cukup Puas	3
Buruk	Kurang Puas	2
Buruk Sekali	Tidak Puas	1

B.KUESIONER UNTUK NELAYAN (Harapan)

No	Pertanyaan	Jawaban				
		1	2	3	4	5
1	Apakah Bapak Puas Terhadap Layanan Dalam Penerbitan/Pembuatan SPB					
2	Apakah bapak puas terhadap layanan dalam penerbitan/pembuatan SIPI					
3	Apakah bapak puas dalam penerbitan/pembuatan SIUP					
4	Apakah bapak puas dengan keadaan fasilitas yang ada dikantor syahbandar					
5	Bagaimana pihak syahbandar dalam melakukan pelayanan terhadap docking kapal?					
6	Apakah bapak puas dalam layanan informasi yang diberikan oleh pihak syahbandar ppp labuhan haji					
7	Apakah ada SOP (Standar Operasional Prosedur) yang digunakan dalam kegiatan pembuatan surat menyurat untuk keberangkatan kapal?					
8	Baigamana pendapat bapak tentang kegiatan pengawasan petugas syahbandar dipelabuhan perikanan labuhan haji?					
9	Apakah bapak puas dengan layanan/keramahan petugas syahbandar terhadap nelayan di PPP labuhan haji?					
10	Apakah bapak puas dengan layanan/keramahan petugas syahbandar terhadap para nelayan di PPP labuhan					

	haji					
11	Bagaimana mengenai pemeriksaan dokumen pada saat kedatangan kapal					
12	Bagaimana tugas dan fungsi kewewengan serta pengawasan pihak syahbandar dalam rangka meningkatkan keamanan dan pelayaran					
13	Bagaimana tugas dan wewenang syahbandar dalam rangka peningkatan keamanan dan keselamatan dilaut?					

Keterangan Score Penilaian :

Kriteria		Nilai
Sangat Baik	Sangat Puas	5
Baik	Puas	4
Sedang	Cukup Puas	3
Buruk	Kurang Puas	2
Buruk Sekali	Tidak Puas	1

